

Katalog : II05014.7315



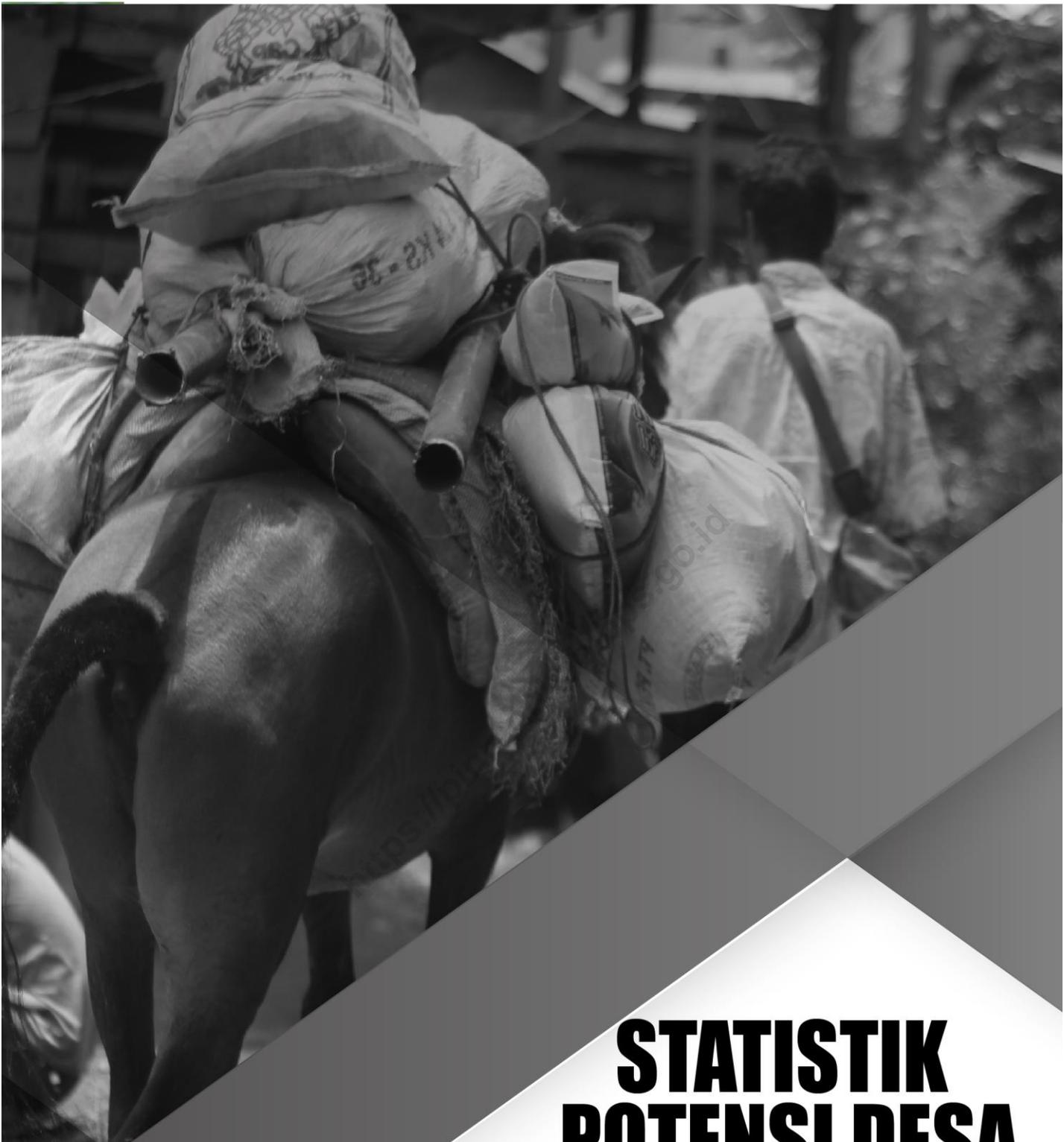
<https://pinrangkab.bps.go.id>

STATISTIK POTENSI DESA

KABUPATEN PINRANG

2018

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**



STATISTIK POTENSI DESA

KABUPATEN PINRANG

2018

STATISTIK POTENSI DESA

Kabupaten Pinrang 2018

No. Publikasi : 73150.1906

Katalog BPS: 1105014.7315

Ukuran Buku: 19 cm x 27 cm

Jumlah Halaman: viii+84

Naskah:

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Pinrang

Gambar Kulit:

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Pinrang

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Statistik Potensi Desa Kabupaten Pinrang 2018 merupakan seri publikasi BPS yang memuat gambaran wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa di seluruh wilayah Kabupaten Pinrang menurut ketersediaan infrastruktur dan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah tersebut.

Data dan informasi yang disajikan dikelompokkan sebagai berikut: keterangan umum desa, kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan dan lingkungan hidup, antisipasi dan kejadian bencana alam, pendidikan dan kesehatan, sosial dan budaya, hiburan dan olah raga, angkutan, komunikasi dan informasi, ekonomi, keamanan, otonomi desa dan program pemberdayaan masyarakat, serta keterangan pemerintah desa.

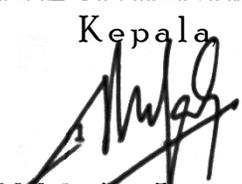
Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan data dan informasi terkait infrastruktur serta potensi wilayah bagi para pengambil kebijakan pembangunan di wilayah Kabupaten Pinrang. Deteksi awal, fenomena ketersediaan infrastruktur maupun potensi antar wilayah terpotret dalam berbagai tabel yang disajikan pada publikasi ini.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam menyukseskan Podes 2018 hingga tersusunnya publikasi ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pengguna publikasi ini untuk perbaikan pada edisi di masa mendatang.

Pinrang, Mei 2019

BPS KABUPATEN PINRANG

Kepala


H. Muh. Asri Lantong, SE
19661121 1993011 001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Ringkasan Eksekutif	1
Pendahuluan Podes 2018	4
Bab I	
Keterangan Umum Desa	7
Bab II	
Kependudukan dan Ketenagakerjaan.....	13
Bab III	
Perumahan dan Lingkungan Hidup.....	20
Bab IV	
Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam.....	29
Bab V	
Pendidikan dan Kesehatan	33
Bab VI	
Sosial dan Budaya	43
Bab VII	
Hiburan dan Olahraga.....	49

Bab VIII	
Angkutan, Komunikasi dan Informasi.....	52
Bab IX	
Ekonomi.....	58
Bab X	
Keamanan.....	67
Bab XI	
Otonomi Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat.....	73
Bab XII	
Keterangan Pemerintah Desa.....	79
Lampiran Kuesioner Podes 2018 Desa	84

Daftar Tabel

Halaman

Bab 1 Keterangan Umum Desa

Tabel 1.1. Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Pinrang, 2018	10
Tabel 1.2. Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang Tahun 2011-2018	10
Tabel 1.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kantor Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Pinrang, 2018	10
Tabel 1.4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018	10
Tabel 1.5. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah di Kabupaten Pinrang, 2018	11
Tabel 1.6. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Laut di Kabupaten Pinrang, 2018	11
Tabel 1.7. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan dan Keberadaan Tanaman Mangrove, di Kabupaten Pinrang, 2018	11

Bab II Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Tabel 2.8. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk di Kabupaten Pinrang, 2018	17
Tabel 2.9. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor di Kabupaten Pinrang, 2018	17
Tabel 2.10. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia dan Agen Pengerah Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pinrang, 2018	18

Bab III Perumahan dan Lingkungan Hidup

Tabel 3.11. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa di Kabupaten Pinrang, 2018	23
Tabel 3.12. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar di Kabupaten Pinrang, 2018	23

Tabel 3.13. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Pinrang, 2018	23
Tabel 3.14. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Keluarga di Kabupaten Pinrang, 2018	24
Tabel 3.15. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga di Kabupaten Pinrang, 2018	24
Tabel 3.16. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai, Saluran Irigasi, Danau/Waduk/ Situ/Bendungan, Embung dan Mata Air, di Kabupaten Pinrang, 2018	24
Tabel 3.17. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Dilalui Saluran Irigasi Menurut Jenis Penggunaan Saluran Irigasi, di Kabupaten Pinrang, 2018	25
Tabel 3.18. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Penggunaan Embung di Kabupaten Pinrang, 2018	25
Tabel 3.19. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sungai Menurut Keberadaan Pabrik/Industri/Rumah Tangga/Lainnya yang Membuang Limbah ke Sungai di Kabupaten Pinrang, 2018	26
Tabel 3.20. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang, 2018	26
Tabel 3.21. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis dan Sumber Utama Pencemaran Lingkungan Hidup Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2017-2018	26
Tabel 3.22. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Pengolahan Sampah Selama Tiga Tahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2015-2018	27
Tabel 3.23. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kebiasaan Masyarakat Membakar Ladang/Kebun dan Keberadaan Penggalian Golongan C di Kabupaten Pinrang, 2018	27

Bab IV Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

Tabel 4.24. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di Kabupaten Pinrang	31
Tabel 4.25. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bencana Alam Dalam Tiga Tahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2015-2018	31

Bab V Pendidikan dan Kesehatan

Tabel 5.26. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Lembaga Keterampilan di Kabupaten Pinrang, 2018	39
Tabel 5.27. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sekolah di Kabupaten Pinrang, 2018	39
Tabel 5.28. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, Kegiatan Pendidikan Paket A/B/C, Kelompok	

Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Pinrang, 2018	40
Tabel 5.29. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Pinrang, 2018	40
Tabel 5.30. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kegiatan Posyandu dan Posbindu di Kabupaten Pinrang, 2018	40
Tabel 5.31. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi yang Tinggal di Desa di Kabupaten Pinrang, 2018	41
Tabel 5.32. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2018	41
Tabel 5.33. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penderita Gizi Buruk Pada Tahun 2017 dan Orang Yang Dipasung Pada Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang	41
Tabel 5.34. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Warga Penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)/Jamkesda dan Warga Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu Pada Tahun 2017 di Kabupaten Pinrang	41

Bab VI Sosial dan Budaya

Tabel 6.35. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Agama, Suku/Etnis, dan Bahasa di Kabupaten Pinrang, 2018	46
Tabel 6.36. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tempat Ibadah di Kabupaten Pinrang, 2018	46
Tabel 6.37. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat di Kabupaten Pinrang, 2018	46
Tabel 6.38. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Korban Bunuh Diri, Lokasi Berkumpul Anak Jalanan, Gelandangan dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Pinrang, 2018	47

Bab VII Hiburan dan Olahraga

Tabel 7.39. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Ruang Publik Terbuka, Pub/Diskotek/Karaoke dan Pusat Kebugaran di Kabupaten Pinrang, 2018	50
Tabel 7.40. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga di Kabupaten Pinrang, 2018	50

Bab VIII Angkutan, Komunikasi dan Informasi

Tabel 8.41. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum di Kabupaten Pinrang, 2018	54
---	----

Tabel 8.42. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Darat Terluas di Kabupaten Pinrang, 2018	54
Tabel 8.43. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat di Kabupaten Pinrang, 2018	54
Tabel 8.44. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum di Kabupaten Pinrang, 2018	55
Tabel 8.45. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Program Televisi dan Radio yang Dapat Diterima Warga di Kabupaten Pinrang, 2018	55
Tabel 8.46. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi di Kabupaten Pinrang, 2018	56

Bab IX Ekonomi

Tabel 9.47. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi di Kabupaten Pinrang, 2018	63
Tabel 9.48. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi di Kabupaten Pinrang, 2018	63
Tabel 9.49. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Pasar, dan Kios Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) di Kabupaten Pinrang, 2018	64
Tabel 9.50. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Fasilitas Perkreditan Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang 2018	64
Tabel 9.51. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan dan Jenis Industri Kecil dan Mikro Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang 2018	65
Tabel 9.52. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Bank di Kabupaten Pinrang 2018	65
Tabel 9.53. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Penunjang Ekonomi di Kabupaten Pinrang 2018	65

Bab X Keamanan

Tabel 10.54. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang	69
Tabel 10.55. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang	69
Tabel 10.56. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2018	69
Tabel 10.57. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Kejahatan di Kabupaten Pinrang	69

Tabel 10.58. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang	70
Tabel 10.59. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang	70
Tabel 10.60. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat di Kabupaten Pinrang, 2018	71

Bab XI Otonomi Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat

Tabel 11.61. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Sistem Informasi Desa dan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Pinrang, 2018	75
Tabel 11.62. Banyaknya Desa Menurut Sumber Pendapatan Desa Tahun 2017	75
Tabel 11.63. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 2018, dan Peraturan Kepala Desa 2017	76
Tabel 11.64. Banyaknya Desa Menurut Kepemilikan Aset Desa, 2018	76
Tabel 11.65. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Kerjasama Desa Tahun 2018	76
Tabel 11.66. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Pendamping Desa Tahun 2018	76
Tabel 11.67. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Program/Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan yang Selain Bersumber dari Dana Desa Selama Tahun 2015-2017	77

Bab XII Keterangan Pemerintah Desa

Tabel 12.68. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018	81
Tabel 12.69. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018	81
Tabel 12.70. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kelompok Umur Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018	81
Tabel 12.71. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Pinrang, 2018	82
Tabel 12.72. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sekretaris Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018	82

Ringkasan Eksekutif

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang telah melaksanakan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 pada bulan Mei 2018 secara sensus terhadap seluruh kecamatan dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, Unit Permukiman Transmigrasi (UPT), dan Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait. Hasil pendataan Podes 2018 merupakan pendataan terhadap ketersediaan infrastruktur, potensi sosial dan ekonomi yang dimiliki administrasi setingkat desa/kelurahan, dan kecamatan, di Kabupaten Pinrang. Hasil pendataan mencatat bahwa terdapat 108 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 69 desa dan 39 kelurahan. Selain itu, diketahui pula jumlah kecamatan sebanyak 12. Selain informasi terkait cakupan wilayah administrasi, Podes 2018 juga menyajikan berbagai informasi terkait ketersediaan infrastruktur penunjang berbasis kewilayahan di Kabupaten Pinrang.

Pada bidang pendidikan, diketahui bahwa seluruh desa/kelurahan (108 desa/kelurahan) telah mempunyai SD/MI. Lebih lanjut, terdapat 58 desa/kelurahan yang telah terdapat SMP/MTs dan 20 desa/kelurahan yang telah terdapat SMA/MA. Untuk infrastruktur kesehatan, hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa 17 desa/kelurahan telah memiliki puskesmas, baik puskesmas dengan rawat inap maupun tanpa rawat inap. Selain itu, terdapat 57 desa/kelurahan yang terdapat puskesmas pembantu (pustu). Terkait ketersediaan tenaga kesehatan yang tinggal di desa, telah terdapat 16 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/spesialis pria dan 17 desa/kelurahan yang terdapat dokter umum/spesialis wanita yang tinggal di desa.

Pada bidang perekonomian, diketahui bahwa terdapat 40 desa/kelurahan sudah memiliki pasar dengan bangunan, baik bangunan permanen maupun semi permanen. Ada sebanyak 7 desa/kelurahan dengan keberadaan pasar tanpa bangunan. Terkait sarana

perdagangan yang lainnya, diketahui bahwa hampir semua desa/kelurahan di Kabupaten Pinrang (107 desa/kelurahan) terdapat toko/warung kelontong.

Untuk keberadaan industri kecil dan mikro diketahui bahwa terdapat 68 desa/kelurahan yang memiliki industri dari kayu. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan jumlah desa/kelurahan yang memiliki industri makanan dan minuman, yakni sebanyak 86 desa/kelurahan. Terkait dengan tingkat elektrisitas, diketahui bahwa sebanyak 106 desa/kelurahan telah terdapat keluarga pengguna listrik PLN. Untuk infrastruktur transportasi diketahui bahwa seluruh desa/kelurahan dapat ditempuh menggunakan sarana transportasi darat. Lebih lanjut diketahui bahwa 54 desa/kelurahan sudah tersedia angkutan umum dengan trayek tetap. Bidang Perumahan dan lingkungan hidup, diketahui bahwa sebagian besar keluarga disebanyak 103 desa/kelurahan menggunakan LPG 3 kg sebagai bahan bakarnya untuk memasak. Selain itu diketahui pula bahwa ternyata masih ada 5 desa/kelurahan yang sebagian besar keluarganya menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak.

Dilihat dari sumber air minum sebagian besar keluarga, ternyata 49 desa/kelurahan di Kabupaten Pinrang masih menggunakan sumur sebagai sumber air minumnya. Pada bidang sanitasi tersisa 3 desa/kelurahan yang fasilitas tempat buang air besar sebagian keluarganya bukan jamban, sedangkan mayoritas yakni sebanyak 105 desa/kelurahan telah menggunakan jamban sendiri sebagai fasilitas tempat buang air besarnya. Pemerintah telah memprioritaskan pembangunan nasional mulai dari pinggiran, yaitu pembangunan desa. Hasil pendataan Potensi Desa (Podes 2018) tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis kewilayahan terkait potensi ekonomi, dan sosial. Selain itu, juga dapat digunakan dalam evaluasi program dan digunakan dalam penyusunan kebijakan/strategi berbasis kewilayahan.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Pendahuluan Podes 2018

Pendahuluan Podes 2018

Data pada publikasi ini berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa yang dilakukan pada tanggal 2-31 Mei 2018. Pendataan Potensi Desa (Podes) telah dilaksanakan sejak tahun 1980. Pengumpulan data Podes dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu sepuluh tahun, sebagai bagian dari siklus sepuluh tahunan kegiatan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Podes dilaksanakan dua tahun sebelum pelaksanaan sensus untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Pada tahun berakhiran '1', pendataan Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Pertanian yaitu identifikasi wilayah konsentrasi usaha pertanian menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '4', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Ekonomi dalam rangka identifikasi usaha menurut sektor dan subsektor. Pada tahun berakhiran '8', Podes dilaksanakan untuk mendukung Sensus Penduduk yaitu untuk identifikasi wilayah permukiman baru.

Pendataan Podes 2018 dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan data yang mendukung perencanaan kegiatan sensus penduduk 2020,
2. sebagai sarana untuk pemutakhiran Master File Desa (MFD),
3. menyediakan data tentang keberadaan dan perkembangan potensi yang dimiliki desa/kelurahan yang meliputi: sosial, ekonomi, sarana, dan prasarana wilayah,
4. menyediakan data bagi keperluan pemutakhiran klasifikasi/tipologi desa, misalnya perkotaan-perdesaan, pesisir non pesisir, dan sebagainya,
5. sebagai sumber data pemutakhiran peta wilayah kerja statistik,
6. menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil
7. menyediakan data bagi penyusunan berbagai analisis seperti identifikasi dan penentuan desa tertinggal, variabel konteks dalam PMT, identifikasi desa rawan bencana, dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis,
8. menyediakan data bagi penghitungan indikator-indikator pembangunan/ kemajuan desa.

Podes 2018 dilaksanakan secara sensus terhadap seluruh kabupaten/kota, kecamatan, dan wilayah administrasi pemerintahan terendah setingkat desa (wilayah administrasi setingkat desa

yang dimaksud, yaitu: desa, kelurahan, nagari dan jorong di Sumatera Barat, Unit Permukiman Transmigrasi atau UPT, dan Satuan Permukiman Transmigrasi atau SPT yang masih dibina oleh kementerian terkait).

Suatu wilayah administrasi pemerintahan ditetapkan sebagai target lokasi pendataan jika wilayah tersebut telah dinyatakan sebagai wilayah yang definitif dan operasional dengan kriteria sebagai berikut: (1) memiliki batas wilayah yang jelas, (2) memiliki penduduk yang menetap di wilayahnya, dan (3) memiliki pemerintahan yang sah dan berdaulat.

Instrumen Podes 2018 yang digunakan sebanyak tiga jenis kuesioner sesuai dengan jenjang wilayah pencacahan, yaitu: kabupaten/kota (PODES2018-KAB/KOTA), kecamatan (PODES2018-KEC) dan desa (PODES2018-DESA). Perbedaan ini dilakukan untuk menjaga kelengkapan dan akurasi data. Sementara itu, referensi waktu bagi setiap data merujuk pada periode pencacahan yaitu Mei 2018, kecuali bagi beberapa data tertentu yang dinyatakan memiliki referensi waktu yang berbeda misalnya satu atau tiga tahun sebelum periode pencacahan.

Pengumpulan data Podes 2018 dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas terlatih dengan narasumber yang relevan di wilayah pencacahan serta penelusuran dokumen terkait. Petugas wawancara adalah aparatur ataupun mitra kerja BPS Kabupaten/Kota yang telah dinyatakan lulus pelatihan pendataan Podes 2018. Sementara itu, narasumber yang dipilih adalah beberapa orang yang memiliki pengetahuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap wilayah target pencacahan. Kemajuan pendataan dilaporkan dan dipantau secara langsung melalui web.

Pengolahan data Podes 2018 dilaksanakan di BPS Kabupaten/Kota dengan maksud untuk mempercepat waktu penyelesaian dan pertimbangan kemudahan untuk validasi data, karena pusat pengolahan data dekat dengan sumber data. Petugas pengolah adalah staf BPS Kabupaten/Kota atau mitra yang ditunjuk yang telah dinyatakan lulus pelatihan petugas pengolah Podes 2018. Dalam rangka menjamin kualitas data maka aplikasi pengolahan data dilengkapi menu *query tools*, *report*, dan tabulasi untuk mengevaluasi data hasil Podes 2018. Selain itu, penjaminan kualitas data juga dilakukan melalui pemeriksaan data secara bertingkat baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, sampai dengan tingkat BPS Pusat. Dilakukan pula rekonsiliasi di tingkat BPS Provinsi dalam rangka penjaminan kualitas.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab I

Keterangan Umum Desa

Keterangan Umum Desa

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS. Berikut ini beberapa konsep definisi yang digunakan dalam pengumpulan variabel keterangan umum desa.

Konsep	Definisi
Desa	adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)
Kelurahan	adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada camat. Lurah diangkat oleh bupati/walikota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)
Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)	adalah satuan permukiman transmigrasi yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan tempat usaha transmigran yang sejak awal direncanakan untuk membentuk suatu desa atau bergabung dengan desa setempat. Organisasi UPT merupakan kelembagaan yang

	bersifat sementara dibentuk sekurang-kurangnya 2 bulan sebelum transmigran ditempatkan dan paling lama 5 tahun (Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER.22/MEN/IX/2007)
Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT)	adalah satuan permukiman potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang sudah ada atau sedang berkembang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2003 tentang Prosedur dan Kriteria Penyiapan Lokasi Permukiman Transmigrasi)
Nagari	adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ilosoi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (PP Nomor 72 Tahun 2005). Satu nagari terdiri dari beberapa Jorong/Korong. Orang yang memimpin Jorong/Korong disebut sebagai Kepala Jorong atau Wali Korong. Catatan: nagari dapat dilihat datanya pada publikasi nasional dan publikasi Provinsi Sumatera Barat
Kantor Kepala Desa/Lurah	adalah bangunan yang dikuasai oleh desa/kelurahan yang diperuntukkan secara khusus untuk kegiatan operasional pemerintah desa/kelurahan baik merupakan aset desa maupun bukan aset desa
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK)	adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Anggota LMK adalah satu orang perwakilan tokoh masyarakat yang dipilih secara demokratis pada tingkat RW (Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010)
Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari	adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah nagari sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007).

<p>Topografi</p>	<p>adalah keadaan muka bumi pada suatu kawasan atau daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lereng/puncak adalah bagian dari gunung/bukit yang terletak di antara puncak sampai lembah. Lereng yang dimaksud juga mencakup punggung bukit dan puncak (bagian paling atas dari gunung) • Lembah adalah daerah rendah di antara dua gunung/pegunungan atau daerah yang mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Lembah di daerah pegunungan lipatan sering disebut sinklin. Lembah di daerah pegunungan patahan disebut graben atau slenk. Sedangkan lembah di daerah yang bergunung-gunung disebut lembah antara pegunungan. • Dataran adalah bagian atau sisi bidang tanah yang tampak datar, rata, dan membentang
<p>Desa Tepi Laut</p>	<p>adalah desa yang sebagian atau seluruh wilayahnya bersinggungan langsung dengan laut, baik berupa pantai maupun tebing karang</p>
<p>Hutan</p>	<p>adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999)</p>
<p>Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan, dibedakan menjadi:</p>	<ol style="list-style-type: none"> a) Di Dalam Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya terletak di tengah/dikelilingi hutan. b) Di Tepi/Sekitar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam hutan. c) Di Luar Kawasan Hutan adalah desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya tidak berbatasan langsung dengan hutan

Berikut ini gambaran umum dari Desa/Kelurahan yang menjadi objek penelitian dalam Potensi Desa 2018 di Kabupaten Pinrang.

Tabel 1.1. Banyaknya Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan				Kecamatan
	Desa	Kelurahan	UPT/SPT	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	69	39	-	108	12

Tabel 1.2. Banyaknya Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang Tahun 2011-2018

Kabupaten	Tahun		
	2011	2014	2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Pinrang	104	108	108

Tabel 1.3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kantor Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Keberadaan Kantor Kepala Desa			Keberadaan Kantor Lurah			Jumlah
	Di Dalam Wilayah Desa	Di Luar Wilayah Desa	Tidak Ada Kantor	Di Dalam Wilayah Kelurahan	Di Luar Wilayah Kelurahan	Tidak Ada Kantor	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	69	-	-	39	-	-	108

Tabel 1.4. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kepemilikan Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Badan Permusyawaratan Desa		Lembaga Musyawarah Kelurahan		Jumlah
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	69	-	39	-	108

Tabel 1.5. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Topografi Wilayah di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Topografi Wilayah			Jumlah
	Lereng/Puncak	Lembah	Dataran	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	10	2	96	108

Tabel 1.6. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Laut di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Tepi Laut	Bukan Tepi Laut	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Pinrang	22	86	108

Tabel 1.7. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Lokasi Desa Terhadap Kawasan Hutan dan Keberadaan Tanaman Mangrove, di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Lokasi Desa/Kelurahan			Jumlah	Keberadaan Tanaman Mangrove
	Dalam Hutan	Tepi/Sekitar Hutan	Luar Hutan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	-	26	82	108	17

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS. Berikut ini beberapa konsep definisi yang digunakan dalam pengumpulan variabel Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

Konsep	Definisi
Penduduk desa/kelurahan yang dicatat pada Podes 2018 adalah	adalah jumlah penduduk yang tercatat pada buku administrasi kependudukan desa/kelurahan berdasarkan laporan desa/kelurahan atau banyaknya penduduk desa/kelurahan yang diketahui oleh aparat desa/kelurahan. Referensi waktu pencatatan adalah kondisi Desember 2017.
Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk	adalah lapangan usahasebagian besar penduduk desa/kelurahan memperoleh penghasilan/pendapatan. Sumber penghasilan penduduk meliputi: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalia, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan, Sektor Angkutan Pergudangan dan Komunikasi, Sektor Jasa, dan Sektor Lainnya.
Sektor Pertanian	adalah lapangan usaha yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan jasa pertanian.

Sektor Pertambangan dan Penggalian	adalah lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian antara lain: pertambangan batu bara,minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, garam, mineral bahan kimia dan bahan pupuk, penambangan gips, aspal, dan sebagainya.
Sektor Industri Pengolahan	adalah kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar (barang mentah) menjadi barang setengah jadi atau barang jadi dan atau barang lain yang memiliki nilai lebih tinggi
Sektor Perdagangan Besar/Eceran dan Rumah Makan	adalah kegiatan jual beli barang (baru/bekas), termasuk usaha restoran, rumah makan dan minuman, katering, restorasi, kafetaria, kantin, warung, dan sebagainya.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)
Sektor Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi,	meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Angkutan adalah kegiatan usaha penyediaan sarana angkutan penumpang atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan sistem berjadwal, baik melalui darat, air maupun udara. 2) Pergudangan adalah kegiatan usaha penyimpanan barang-barang sementara (bukan stok) sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial. 3) Komunikasi adalah kegiatan usaha telekomunikasi, penyajian penerbitan, pos, dan giro
Sektor Jasa	adalah kegiatan layanan atau penyediaan jasa, meliputi: pendidikan, kesehatan, kemasyarakatan, serta pemerintahan dan perorangan.
Sektor Lainnya	adalah kegiatan usaha yang bidang usaha atau sektornya tidak termasuk pada rincian di atas, seperti air, gas, listrik, konstruksi/bangunan, perbankan, dan sebagainya.

<p>Jenis Komoditi/Subsektor Pertanian</p>	<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Palawija terdiri dari: jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, talas, dan sebagainya. b) Hortikultura adalah kegiatan pertanian tanaman hortikultura meliputi buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat-obatan. c) Peternakan adalah kegiatan peternakan yang mencakup baik ternak besar (sapi, kerbau, kuda, dan lainlain), ternak kecil (kambing, domba, babi, kelinci, dan lain-lain), maupun unggas (ayam, itik, burung, dan lainlain). Termasuk budidaya hewan untuk diambil hasilnya seperti telur, susu, madu, bulu, dan sebagainya. d) Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk menangkap dan mengumpulkan ikan (pisces) ataupun biota laut lain (misalnya rumput laut, mollusca, udang-udangan) yang hidup secara alamiah dengan alat ataupun cara apapun e) Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan atau biota perairan laut lain (misalnya rumput laut) serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. Termasuk kegiatan memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ikan atau biota perairan lain f) Budi Daya Tanaman Kehutanan adalah kegiatan kehutanan yang menghasilkan produk tanaman kehutanan (kayu, daun, getah, dan lain-lain) termasuk usaha pembibitan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual/ditukar atas resiko usaha g) Pemungutan Hasil Hutan adalah kegiatan mengambil benda-benda hayati hutan, dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar atas risiko usaha. Jenis hasil hutan yang biasa dipungut, seperti kayu bakar, bambu, rotan, buah-buahan, jamur, lumut, madu, sarang burung telur, kotoran burung, dan lain-lain. h) Penangkapan Satwa Liar adalah kegiatan yang meliputi perburuan binatang, seperti berburu babi hutan, rusa, dan sebagainya, dengan menggunakan perlengkapan, seperti senapan, panah, dan tombak.
--	---

	<p>i) Penangkapan Satwa/Tumbuhan Liar adalah kegiatan perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa/tumbuhan liar dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya. Kegiatan tersebut dapat dilakukan di dalam maupun di luar habitat dengan tujuan untuk kelestarian satwa/tumbuhan liar maupun komersil, seperti arwana, anggrek, kera ekor panjang, buaya, dan lain-lain</p> <p>j) Jasa Pertanian meliputi jasa penunjang produksi pertanian dan pasca panen seperti: pengelolaan bibit tanaman untuk pengembangbiakan, pembibitan tanaman hias, persewaan traktor, jasa penggilingan padi, dan sebagainya.</p>
Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	Adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
Agen Pengerahan TKI ke Luar Negeri	adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mencari, merekrut, menampung, dan menyalurkan TKI untuk bekerja di luar negeri.

Berikut ini gambaran umum dari variabel kependudukan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang :

Tabel 2.8. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten:	Sumber Penghasilan Utama							
	Pertanian	Pertambangan dan Peggalian	Industri Pengolahan	Perdagangan Besar/E-ceran	Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	Jasa	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pinrang	102	-	-	6	-	-	-	108

Tabel 2.9. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Sebagian Besar Penduduknya Bekerja pada Sektor Pertanian Menurut Sub Sektor di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Sub Sektor Pertanian						
	Padi	Palawija	Hortikultura	Karet	Kelapa Sawit	Kopi	Kakao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	73	10	2	-	-	2	3

Tabel 2.9. Sambungan

Kabupaten	Sub Sektor Pertanian							
	Kelapa	Lada	Cengkeh	Tembakau	Tebu	Peternakan	Perikanan Tangkap	Perikanan Tangkap
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pinrang	-	-	-	-	-	1	6	5

Tabel 2.9. Sambungan

Kabupaten	Sub Sektor Pertanian						Jumlah
	Budidaya Tanaman Kehutanan	Pemungutan Hasil Hutan	Penangkapan Satwa Liar	Penangkaran Satwa/Tumbuhan Liar	Jasa Pertanian	Lainnya	
(1)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Pinrang	-	-	-	-	-	-	102

Tabel 2.10. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kerja Indonesia dan Agen Pengerah Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Tenaga Kerja Indonesia		Agen Pengerah Tenaga Kerja Indonesia	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	100	3	13	95

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab III

Perumahan dan Lingkungan Hidup

Perumahan dan Lingkungan Hidup

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel Perumahan dan Lingkungan Hidup, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Keluarga Pengguna Listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara)	adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik yang disalurkan oleh PLN dengan atau tanpa meteran resmi dari PLN
Keluarga Pengguna Listrik Non-PLN	adalah keluarga pengguna/pelanggan listrik selain PLN, misalnya diesel/generator, listrik diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, atau listrik swadaya masyarakat
Keluarga Bukan Pengguna Listrik	adalah keluarga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber energi untuk penerangan rumah.
Jalan Utama Desa	adalah jalan yang dianggap oleh sebagian besar penduduk desa/kelurahan setempat sebagai jalan yang paling penting atau paling sering digunakan untuk arus transportasi dari/ menuju kantor camat terdekat.
Sumber Penerangan Jalan Utama	adalah jenis penerangan dan sumber pembiayaan penerangan yang ada di jalan utama desa. Dikelompokkan menjadi: listrik diusahakan oleh pemerintah, listrik non-pemerintah, dan non-listrik.

Bahan Bakar	adalah jenis bahan yang digunakan untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa/kelurahan.
Tempat Pembuangan Sampah mencakup 5 kategori	<ul style="list-style-type: none"> a. Tempat sampah yang kemudian diangkut; b. Dikumpulkan dalam lubang kemudian dibakar; c. Dibuang di sungai/saluran irigasi/danau/laut; d. Dibuang di drainase (got/selokan) e. Lainnya (misalnya dikumpulkan kemudian dipakai sebagai bahan pembuatan kompos, d.s.b)
Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS)	adalah tempat atau lahan yang digunakan sebagai penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara sebelum diangkut ke tempat perdauran ulang, pengolahan atau tempat pengolahan sampah terpadu.
Sungai	adalah tempat, wadah, dan jaringan air yang terbentuk secara alamiah maupun buatan mulai dari mata air (hulu) sampai muara (hilir) dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sungai yang dimaksud di sini termasuk anak sungai, kanal, dan sodetan (Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011)
Embung	adalah bangunan yang berfungsi menampung kelebihan air yang terjadi pada musim hujan untuk persediaan suatu desa di musim kering.
Mata air	adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya (alami)
Pencemaran Lingkungan Hidup	Adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam satu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

Penggalian Golongan C

adalah kegiatan penggalian pada wilayah permukaan bumi yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Bahan-bahan galian golongan C (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980) antara lain:

- a. Nitrat, phosphate, garam batu (halite);
- b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- c. Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
- d. Batu permata, batu setengah permata;
- e. Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
- f. Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
- g. Marmer, batu tulis;
- h. Batu kapur, dolomite, kalsit;
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A dan golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Variabel Perumahan dan Lingkungan Hidup hasil dari pendataan Potensi Desa 2018 disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.11. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Keluarga Pengguna Listrik dan Sumber Penerangan Jalan Utama Desa di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Pengguna Listrik		Bukan Pengguna Listrik ¹	Sumber Penerangan Jalan Utama		
	PLN	Non PLN		Listrik Pemerintah	Listrik Non Pemerintah	Non Listrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	106	9	39	98	5	-

Catatan¹ : Mencakup desa/kelurahan yang sama sekali tidak ada keluarga pengguna listrik atau yang terdapat keluarga pengguna listrik, namun di wilayah tersebut masih ada keluarga bukan pengguna listrik.

Tabel 3.12. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak yang Digunakan Oleh Sebagian Besar Keluarga dan Keberadaan Agen/Penjual Bahan Bakar di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Jenis Bahan Bakar						
	Gas Kota	LPG 3 kg	LPG lebih dari 3 kg	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	-	103	-	-	5	-	108

Tabel 3.13. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Tempat Pembuangan Sampah dan Ketersediaan Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Jenis Tempat Pembuangan Sampah					
	Tempat Sampah Kemudian Diangkut	Dalam Lubang/Dibakar	Sungai/Saluran Irigasi/Danau/Laut	Drainase	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	14	71	21	-	2	108

Tabel 3.14. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Sumber Air Minum Sebagian Keluarga di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Air Kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Ledeng Dengan Meteran	Ledeng tanpa Meteran	Sumur Bor atau pompa	Sumur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	-	43	1	2	38	11

Tabel 3.14. Sambungan

Kabupaten	Mata Air	Sungai/Danau/Kolam/Waduk/Situ/Embung/Bendungan	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pinrang	2	11	-	-	108

Tabel 3.15. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Jamban			Bukan Jamban	Jumlah
	Sendiri	Bersama	Umum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	105	-	-	3	108

Tabel 3.16. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sungai, Saluran Irigasi, Danau/Waduk/ Situ/Bendungan, Embung dan Mata Air, di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Sungai	Saluran Irigasi	Danau/Waduk/ Situ/Bendungan	Embung	Mata Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	70	91	9	10	21

Tabel 3.17. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Dilalui Saluran Irigasi Menurut Jenis Penggunaan Saluran Irigasi, di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Mandi/Cuci	Minum/Masak	Bahan Baku Air Minum	Pengairan/Irigasi	Pariwisata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	7	2	4	90	-

Tabel 3.17. Sambungan

Kabupaten	Perikanan	Transportasi	Pembangkit Listrik	Tidak Dimanfaatkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pinrang	11	-	-	-

Tabel 3.18. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Penggunaan Embung di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Mandi/Cuci	Minum/Masak	Bahan Baku Air Minum	Pengairan/Irigasi	Pariwisata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	3	2	2	7	-

Tabel 3.18. Sambungan

Kabupaten	Perikanan	Pembangkit Listrik	Industri/Pabrik	Lainnya	Tidak Dimanfaatkan
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pinrang	-	-	-	-	-

Tabel 3.19. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sungai Menurut Keberadaan Pabrik/Industri/Rumah Tangga/Lainnya yang Membuang Limbah ke Sungai di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Desa yang Mempunyai Sungai	Pabrik/Industri/Rumah Tangga/Lainnya Membuang Limbah ke Sungai			
		Di Dalam Desa/Kelurahan	Di Luar Desa/Kelurahan	Di Dalam dan Luar Desa/Kelurahan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	70	3	5	3	11

Tabel 3.20. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Pencemaran Air	Pencemaran Tanah	Pencemaran Udara	Tidak Ada Pencemaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	11	-	10	92

Tabel 3.21. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis dan Sumber Utama Pencemaran Lingkungan Hidup Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2017-2018

Kabupaten	Sumber Pencemaran Air			Sumber Pencemaran Tanah		
	Rumah Tangga	Pabrik	Lainnya	Rumah Tangga	Pabrik	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	3	4	4	-	-	-

Tabel 3.22. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kegiatan Pelestarian Lingkungan dan Pengolahan Sampah Selama Tiga Tahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2015-2018

Kabupaten	Pelestarian Lingkungan ¹		Pengolahan/Daur Ulang Sampah/Limbah	
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	20	88	14	94

Catatan¹: Pelestarian lingkungan yang dimaksud dapat berupa penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove dsj.

Tabel 3.23. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kebiasaan Masyarakat Membakar Ladang/Kebun dan Keberadaan Penggalian Golongan C di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Kebiasaan Masyarakat Membakar Ladang/Kebun		Keberadaan Penggalian Golongan C		Kabupaten
	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	39	69	19	89	108

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab IV

Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Bencana Alam	adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa bencana yang terjadi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan dirinci setiap tahun, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Dalam suatu kejadian bencana alam dapat menimbulkan beberapa peristiwa alam lainnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor sehingga mengakibatkan kerugian materi maupun non-materi.
Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana alam pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Sistem peringatan dini bencana alam yang dimaksud, misalnya peringatan dini terhadap warga mengenai status ketinggian pintu air, status gunung, d.s.b yang disampaikan melalui kentongan, pemberitahuan dengan <i>loud speaker</i> , dan lainnya.
Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, d.l.l.	Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu contoh yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan bencana. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.

<p>Sistem Peringatan Dini Tsunami</p>	<p>adalah fasilitas pendeteksian kejadian bencana alam tsunami untuk memberikan peringatan dini sebelum bencana alam tsunami datang/menimpa desa/kelurahan. Sistem ini menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam tsunami itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini tsunami meliputi semua desa kelurahan yang dapat dijangkau oleh sistem tersebut dan bukan hanya desa/kelurahan dimana lokasi alat tersebut berada.</p>
<p>Perlengkapan Keselamatan</p>	<p>adalah perlengkapan yang diupayakan/disediakan oleh aparat setempat maupun warga desa untukantisipasi maupun evakuasi korban saat terjadi bencana alam, seperti: perahu karet, tenda, persediaan masker, dan sebagainya.</p>
<p>Rambu-rambu dan Jalur Evakuasi</p>	<p>adalah rambu-rambu/tanda dan jalur atau rute khusus yang digunakan untuk evakuasi pada saat terjadi bencana alam. Rambu-rambu dan jalur atau rute ini bisa tersedia di desa/kelurahan dalam bentuk apapun, misal peta, petunjuk evakuasi, dan lokasi aman untuk berkumpul (muster point). Hal yang terpenting adalah jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam, warga desa/kelurahan tahu jalur atau rute evakuasi yang harus dilewati.</p>

Variabel Antisipasi dan Kejadian Bencana Alam hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 4.24. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Upaya Antisipasi/Mitigasi Bencana Alam di Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Sistem Peringatan Dini Bencana Alam	Sistem Peringatan Dini Tsunami	Perlengkapan Keselamatan	Rambu-Rambu dan Jalur Evakuasi	Pembuatan, Perawatan, atau Normalisasi: Sungai, Kanal, Tanggul, dll
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	4	-	4	3	8

Tabel 4.25. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Bencana Alam Dalam Tiga Tahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2015-2018

Kabupaten	Tanah Longsor	Banjir	Banjir Bandang	Gempa Bumi	Tsunami	Gelombang Pasang Laut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	6	18	2	-	-	5

Tabel 4.25. Sambungan

Kabupaten	Angin Puyuh/Puting Beliung/Topan	Gunung Meletus	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kekeringan	Tidak Ada Bencana Alam
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pinrang	35	-	4	2	54

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab V

Pendidikan dan Kesehatan

Pendidikan dan Kesehatan

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel Pendidikan dan Kesehatan, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Jenjang Pendidikan Formal	terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jenis pendidikan yang diajarkan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus
Pendidikan Dasar	berbentuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
Pendidikan Menengah	berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.
Pendidikan Tinggi	merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
Jenjang Pendidikan Nonformal	meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan keaksaraan, pendidikan

	keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, satuan pendidikan irmal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
Lembaga Keterampilan	adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh lembaga/pelatihan/kursus keterampilan yang mempunyai ciri: jangka waktu pendidikan relatif pendek, ditujukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat umum, dan menyediakan sertiiakat bagi peserta yang lulus.
Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) atau biasa disebut PAUD	adalah tempat kegiatan pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan/perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini).
Keaksaraan Fungsional	adalah metode pemberantasan buta aksara meliputi pengajaran kemampuan baca, tulis, dan hitung, serta berbagai keterampilan lain. Keterampilan disini tergantung proposal yang diajukan, misal memasak, menjahit, pembuatan kain sulam, d.s.b
Kelompok Bermain (<i>Play Group</i>)	adalah pendidikan anak-anak usia 2-6 tahun yang berfungsi untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
Taman Penitipan Anak	adalah bentuk intervensi pendidikan bagi anak usia 3 bulan sampai memasuki pendidikan dasar pada lembaga taman penitipan anak (wahana kesejahteraan anak yang biasanya berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu bagi anak yang orang tuanya bekerja).
Taman Pendidikan Al Quran	adalah kegiatan Taman Pendidikan AlQur'an yang masih beroperasi di desa/kelurahan baik yang memiliki izin maupun tidak.
Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	adalah lembaga yang lahir dari dan untuk masyarakat yang merupakan potensi dalam memberdayakan warga (masyarakat umum) untuk belajar dan memperoleh informasi/pengetahuan untuk meningkatkan taraf hidup.

Pendidikan Keagamaan	dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan nonformal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, seminari dan bentuk lain yang sejenis
Pondok pesantren (Ponpes)	adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP Nomor 55 tahun 2007)
Madrasah Diniyah	adalah bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi hasrat masyarakat tentang pendidikan agama. Madrasah Diniyah termasuk ke dalam pendidikan yang dilembagakan dan bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam penguasaan terhadap pengetahuan agama Islam (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang ditindaklanjuti dengan disahkannya PP Nomor 55 Tahun 2007, Undang-Undang Pendidikan dan Peraturan Pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional).
Seminari/sejenisnya	adalah lembaga pendidikan tinggi agama Katolik/ Kristen, dalam profesi kepastoran dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam kompleks pendidikan. Contoh sejenisnya adalah Pendidikan Alkitab untuk Agama Protestan.
Rumah Sakit	adalah sarana kesehatan/ bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawatjalan atau rawat inap yang pelayanannya disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya
Rumah Sakit Bersalin	adalah rumah sakit khusus untuk persalinan, dilengkapi pelayanan spesialis pemeriksaan kehamilan, persalinan, rawat inap, dan rawat jalan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan dokter spesialis kandungan.
Puskesmas	adalah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah (pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/ kota) yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa.
Puskesmas Pembantu (Pustu)	sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan.
Poliklinik	adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.

Balai pengobatan	adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan
Tempat Praktek Dokter	adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek dokter yang biasanya memberikan pelayanan berobat jalan, termasuk praktik dokter yang mempunyai fasilitas rawat inap dan apotek.
Rumah Bersalin	adalah sarana pelayanan kesehatan dengan izin sebagai rumah bersalin, dilengkapi pelayanan pemeriksaan kehamilan, persalinan serta pemeriksaan ibu dan anak yang berada di bawah pengawasan bidan senior.
Tempat Praktek Bidan	adalah sarana Kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek bidan yang biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.
Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	adalah sarana kesehatan/bangunan yang dibentuk di desa/kelurahan dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa/ kelurahan.
Pondok Bersalin Desa (Polindes)	adalah bangunan yang dibangun dengan sumbangan dana pemerintah dan partisipasi masyarakat desa untuk tempat pertolongan persalinan dan pemondokan ibu bersalin, sekaligus tempat tinggal bidan di desa.
Apotek	adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pekerjaan kefarmasian, dan penyaluran/penjualan obat/bahan farmasi.
Toko Khusus Obat/Jamu	adalah tempat tertentu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan menyimpan, dan menjual obat/bahan khusus untuk obat/jamu
Posyandu	adalah salah satu wadah peran serta masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan memantau pertumbuhan balita dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara dini. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak.
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dikenal Posbindu PTM (penyakit tidak menular)	merupakan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik (Juknis Pelaksanaan Posbindu, Kemenkes, 2012).

Tenaga Kesehatan	adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan)
Dokter	meliputi dokter umum dan dokter spesialis, tidak termasuk dokter hewan.
Bidan	adalah seorang petugas paramedic yang memperoleh pendidikan formal mengenai kebidanan dan berdomisili/ tinggal di desa/kelurahan.
Tenaga kesehatan lainnya	meliputi: tenaga keperawatan, tenaga psikologi klinis, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan isik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan sebagainya.
Dukun Bayi/Dukun Bersalin (Paraji)	adalah wanita yang memiliki keterampilan secara turun temurun untuk menolong persalinan secara tradisional.
Kejadian Luar Biasa (KLB)	<p>adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/ MENKES/PER/X/2010). Penetapan KLB dapat dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepala dinas kesehatan Kabupaten/ Kota, Kepala dinas kesehatan provinsi, bila kepala dinas kesehatan kabupaten/ kota tidak menetapkan daerahnya dalam keadaan KLB, Menteri kesehatan, bila kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota tidak menetapkan suatu daerah di wilayahnya dalam keadaan KLB.
Wabah Penyakit Menular	adalah berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka (Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010). Penetapan wabah dapat dilakukan oleh menteri kesehatan.

Gizi Buruk	adalah suatu keadaan kekurangan konsumsi zat gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energy protein dalam makanan sehari-hari, yang ditandai dengan berat dan tinggi badan tidak sesuai umur (dibawah rata-rata) dan harus ditetapkan oleh tenaga medis. Busung lapar termasuk salah satu bentuk gizi buruk. Secara klinis, status gizi buruk terdapat tiga tipe, yaitu: marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor.
Orang yang Dipasung	adalah tindakan masyarakat terhadap penderita gangguan jiwa (biasanya yang berat) dengan cara dikurung, dirantai kakinya, dimasukkan kedalam balok kayu, dan lain-lain sehingga kebebasannya menjadi hilang
BPJS	adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan jaminan sosial. BPJS tersebut merupakan implementasi dari Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2014 dengan dua cakupan jaminan sosial yaitu kesehatan dan Ketenagakerjaan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran)	Merupakan jaminan pembiayaan kesehatan dari pemerintah bagi masyarakat yang iurannya ditanggung pemerintah pusat dan diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai pemegang KIS, KJS, dan JAMKESMAS dimana semuanya dialihkan menjadi peserta BPJS PBI dengan kartu identitas yaitu KIS (Kartu Indonesia Sehat)
Jamkesda atau Jaminan Kesehatan Daerah	adalah program pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat miskin oleh pemerintah daerah yang tidak masuk dalam program peserta BPJS PBI.
Surat Miskin/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	adalah surat keterangan yang diberikan oleh kepala desa/ lurah kepada masyarakat miskin untuk keperluan tertentu.

Variabel Pendidikan dan Kesehatan hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 5.26. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Lembaga Keterampilan di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Bahasa Asing	Komputer	Menjahit/Tata Busana	Kecantikan	Montir Mobil/Motor	Elektronika	Lainnya	Tidak ada Lembaga Keterampilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pinrang	7	5	7	4	3	1	1	94

Tabel 5.27. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mempunyai Sekolah di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Pos PAUD	TK/RA/BA	SD/MI	SMP/MTs	SMU/MA	SMK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	58	101	108	58	20	14

Tabel 5.27. Sambungan

Kabupaten	Akademi/Perguruan Tinggi	SD Luar Biasa	SMP Luar Biasa	SMA Luar Biasa	Pondok Pesantren	Madrasah Diniyah	Seminari/Sejenisnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pinrang	5	1	-	-	13	3	-

Tabel 5.28. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, Kegiatan Pendidikan Paket A/B/C, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Keaksaraan Fungsional	Pendidikan Paket A/B/C	Kelompok Bermain	Taman Penitipan Anak	Taman Pendidikan Al-Qur'an	Taman Bacaan Masyarakat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	10	16	13	1	79	36

Tabel 5.29. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Kesehatan di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Rumah Sakit	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas ¹	Puskesmas Pembantu	Poliklinik/Balai Pengobatan	Tempat Praktek Dokter
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	3	1	17	57	1	17

Catatan¹ : Puskesmas mencakup Puskesmas dengan rawat inap dan puskesmas tanpa rawat inap

Tabel 5.29. Sambungan

Kabupaten	Rumah Bersalin	Tempat Paktek Bidan	Poskesdes	Polindes	Apotek	Toko Khusus Obat/Jamu
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pinrang	3	36	57	13	15	29

Tabel 5.30. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kegiatan Posyandu dan Posbindu di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Kegiatan Posyandu		Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)
	Setiap Sebulan Sekali	Seiap 2 Bulan atau Lebih	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pinrang	105	6	10

Tabel 5.31. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tenaga Kesehatan dan Dukun Bayi yang Tinggal di Desa di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Tenaga Kesehatan yang Tinggal Di Desa					Dukun Bayi
	Dokter Pria	Dokter Wanita	Dokter Gigi	Bidan	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	16	17	19	107	98	83

Tabel 5.32. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Luar Biasa (KLB)/Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Muntaber /Diare	Demam Berdarah	Campak	Malaria	Flu Burung/SARS	Hepatitis E	Difteri	Lainnya	Tidak Ada KLB/Wabah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pinrang	2	3	-	-	-	-	-	-	104

Tabel 5.33. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penderita Gizi Buruk Pada Tahun 2017 dan Orang Yang Dipasung Pada Tahun 2018 di Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Penderita Gizi Buruk	Orang yang Dipasung
(1)	(2)	(3)
Pinrang	11	20

Tabel 5.34. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Warga Penerima BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI)/Jamkesda dan Warga Penerima Surat Keterangan Tidak Mampu Pada Tahun 2017 di Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Penerima BPJS PBI/Jamkesda	Penerima Surat Miskin/SKTM
(1)	(2)	(3)
Pinrang	105	107

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab VI

Sosial dan Budaya

Sosial dan Budaya

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel Sosial dan Budaya, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Tempat Ibadah	adalah bangunan/ ruangan yang lokasinya tetap dan peruntukannya khusus untuk ibadah oleh masyarakat umum sesuai agama yang dianut tanpa memandang status kepemilikan, termasuk bangunan/ruangan yang lokasinya tetap dan fungsinya dikhususkan untuk ibadah di fasilitas umum. Tidak termasuk tempat ibadah yang khusus dipakai oleh pribadi/keluarga
Masjid	adalah tempat peribadatan umat Islam, yang dapat digunakan untuk Sholat Jum'at.
Surau/Langgar	adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan tidak digunakan untuk Sholat Jum'at
Gereja Kristen	adalah tempat ibadah untuk umat Kristen
Gereja Katolik	adalah tempat ibadah untuk umat Katolik
Kapela	adalah tempat ibadah untuk umat Katolik yang tidak ada Pastur.

Pura	adalah tempat ibadah umat Hindu.
Vihara	adalah tempat ibadah umat Buddha.
Klenteng	adalah tempat ibadah umat Konghucu.
Lainnya	khusus untuk tempat ibadah Aliran Penghayat Kepercayaan. Contohnya Balai Basarah, yang merupakan tempat ibadah umat Kaharingan
Penyandang Cacat	adalah orang yang mengalami kecacatan sehingga terganggu/terhambat dalam melakukan suatu kegiatan sebagaimana layaknya.
Tunanetra (Buta)	adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Tunanetra dibedakan ke dalam dua golongan yaitu: buta total dan kurang awas. Buta total jika kedua mata tidak dapat melihat sama sekali. Kurang awas, bila dua mata tidak dapat menghitung jari-jari tangan yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.
Tunarungu (Tuli)	adalah kondisi isik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara.
Tunawicara (Bisu)	adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara.
Tunarungu-wicara (tuli-bisu)	adalah ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara dan berbicara. Seseorang menjadi bisu umumnya disebabkan karena tuli.
Tunadaksa (Cacat Tubuh)	adalah kelainan pada tulang, otot atau sendi anggota gerak dan tubuh, serta kelumpuhan/ketidaklengkapan anggota gerak/tulang sehingga menimbulkan gangguan gerak.
Tunagrahita (Cacat Mental/Keterbelakangan Mental)	adalah kelainan/ keterbelakangan mental/jiwa sehingga tidak mampu melakukan aktivitas yang umum dilakukan orang lain seusianya, contoh idiot

Tunalaras	adalah hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
Cacat Eks Sakit Kusta	adalah kecacatan yang disebabkan oleh penyakit kusta/lepra yang secara medis sudah dinyatakan sembuh
Cacat Ganda (Cacat Fisik-Mental)	adalah orang yang menderita cacat mental (tunagrahita atau tunalaras) dan cacat isik (buta, tuli, bisu, bisutuli atau cacat tubuh)
Korban bunuh diri	adalah seseorang yang perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa sendiri atas kemauan sendiri atau karena bujukan, rayuan, dan hasutan, termasuk yang mencoba bunuh diri tetapi tidak meninggal. Korban bunuh diri mencakup juga upaya percobaan bunuh diri.
Lokasi Berkumpul Anak Jalanan	adalah titik-titik lokasi berkumpulnya anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun tempat-tempat umum, seperti pasar, mall, terminal bis, stasiun kereta api, taman kota (Kementerian Sosial RI).
Lokasi Gelandangan	adalah titik-titik lokasi yang menjadi tempat mangkal/tinggal gelandangan dan pengemis, misalnya jembatan, emperan toko, d.l.l.
Lokalisasi/Lokasi/Tempat Mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK)	adalah tempat PSK menjajakan diri baik secara legal maupun ilegal yang dikelola secara kelompok maupun individu.

Variabel Sosial dan Budaya hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 6.35. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Agama, Suku/Etnis, dan Bahasa di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Agama		Etnis		Bahasa	
	Satu Agama	Multi Agama	Satu Etnis	Multi Etnis	Satu Bahasa	Multi Bahasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	47	61	3	105	6	102

Tabel 6.36. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Tempat Ibadah di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Mas- jid	Surau/ Langgar /Musala	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Kapel	Pura	Vihara	Kelen- teng	Lainnya	Tidak Ada Tempat Ibadah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pinrang	107	64	11	7	-	-	-	-	-	-

Tabel 6.37. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Penyandang Cacat di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Ada Penyandang Cacat	Jenis Kecacatan			
		Tunanetra	Tunarungu	Tunawicara	Tunarungu- wicara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	108	75	49	48	68

Tabel 6.37. Sambungan

Kabupaten	Jenis Kecacatan				
	Tunadaksa	Tunagrahita	Tunalaras	Cacat Eks Sakit Kusta	Cacat Ganda
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pinrang	67	82	64	27	11

Tabel 6.38. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Korban Bunuh Diri, Lokasi Berkumpul Anak Jalanan, Gelandangan dan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Korban Bunuh Diri	Lokasi Berkumpul Anak Jalanan	Lokasi Gelandangan	Lokasi Pekerja Seks Komersial (PSK)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	16	2	1	-

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab VII

Hiburan dan Olahraga

Hiburan dan Olahraga

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel Hiburan dan Olahraga, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Ruang Publik Terbuka	adalah lahan umum yang utamanya diperuntukkan sebagai tempat berkumpul warga seperti untuk bersantai, bermain tanpa perlu membayar. Ruang publik terbuka dapat berupa lapangan terbuka/alun-alun, taman, tempat bermain, d.s.b.
Pub/diskotek/tempat karaoke	adalah tempat/gedung yang digunakan secara permanen untuk pub/diskotek/karaoke. Tidak termasuk peralatan karaoke yang disewakan.
Pusat Kebugaran	adalah tempat khusus berolahraga ataupun melakukan aktivitas isik. Sebuah <i>itness centre</i> yang biasanya menyajikan banyak fasilitas dengan konsep <i>one stop sport</i> dan <i>entertainment</i> menjadi kunci utamanya.

Variabel Hiburan dan Olahraga hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 7.39. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Ruang Publik Terbuka, Pub/Diskotek/Karaoke dan Pusat Kebugaran di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Ruang Publik Terbuka	Pub/Diskotek/Karaoke	Pusat Kebugaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Pinrang	52	7	14

Tabel 7.40. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Ketersediaan Fasilitas/Lapangan Olahraga di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Sepak Bola	Bola Voli	Bulu Tangkis	Bola Basket	Tenis Lapangan	Tenis Meja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	83	101	56	21	16	67

Tabel 7.40. Sambungan

Kabupaten	Futsal	Renang	Bela Diri	Bilyard	Lainnya
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pinrang	17	5	19	9	17

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab VIII

Angkutan, Komunikasi dan Informasi

Angkutan, Komunikasi dan Informasi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel Angkutan, Komunikasi dan Informasi, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Prasarana Transportasi	adalah sarana penunjang lalu lintas pemindahan orang dan atau barang, yang terdiri atas jalan, jembatan, dermaga, pelabuhan, dan lainlain yang digunakan oleh warga desa untuk mobilitas dari dan ke desa terdekat
Angkutan Umum	adalah sarana angkutan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan dipungut bayaran (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan)
Trayek	adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang atau orang dan barang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal
Jenis Permukaan Jalan Terluas	adalah jenis permukaan jalan terluas yang ada di desa/kelurahan. Jenis permukaan jalan terdiri dari: aspal/beton, diperkeras (dengan kerikil atau batu), tanah, dan lainnya yaitu terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak,

	jalan di hutan dan sejenisnya.
Base Transceiver Station (BTS)	adalah alat yang berfungsi sebagai pengirim dan penerima (transceiver) sinyal komunikasi seluler. Biasanya BTS ditandai adanya menara/tower yang dilengkapi antenna sebagai perangkat transceiver
Sinyal telepon seluler	adalah besaran elektromagnetik yang berubah dalam ruang dan waktu dengan membawa informasi yang memberikan konfirmasi bahwa layanan telepon seluler sudah tersedia.
Sinyal internet GSM atau CDMA	adalah jaringan sistem data paket internet dengan kecepatan transfer data tertentu. Paket data disini biasanya digunakan dalam melakukan akses internet. Protokol transfer data ini mengalami beberapa perubahan mulai dari yang kecepatannya rendah sampai tinggi yaitu GPRS, <i>Edge</i> , HSPA, 3G, kemudian 4G.
Program TV	adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV daerah, TV swasta, maupun TV luar negeri. Program TV yang dimaksud adalah program TV baik menggunakan antena parabola/TV kabel maupun tidak
Warnet	adalah usaha penyewaan jasa internet seperti: usaha sewa computer dengan jaringan internet termasuk yang digunakan sebagai <i>game online</i> .
Kantor Pos	adalah tempat pemberi pelayanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil
Pos Keliling	adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu
Perusahaan Jasa Agen Ekspedisi Swasta	adalah pelayanan pengiriman paket maupun dokumen yang dikelola oleh pihak swasta, misalnya Tiki, JNE, ESL, d.l.l.

Variabel Angkutan, Komunikasi dan Informasi hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 8.41. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Prasarana Transportasi dan Ketersediaan Angkutan Umum di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Jenis Prasarana Transportasi				Ketersediaan Angkutan Umum		
	Darat	Air	Darat dan Air	Udara	Ada, Dengan Trayek Tetap	Ada, Tanpa Trayek Tetap	Tidak Ada Angkutan Umum
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	107	-	1	-	54	31	23

Tabel 8.42. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Jenis Permukaan Jalan Darat Terlulus di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Aspal/Beton	Diperkeras (Kerikil, Batu, dll)	Tanah	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	97	10	1	-	108

Tabel 8.43. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Menggunakan Prasarana Transportasi Darat atau Darat dan Air Menurut Keberadaan Jalan yang Dapat Dilalui Kendaraan Roda Empat di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Sepanjang Tahun	Sepanjang Tahun Kecuali Saat Tertentu	Selama Musim Kemarau	Tidak Dapat Dilalui Sepanjang Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	108	-	-	-	108

Tabel 8.44. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Base Transceiver Station (BTS), Sinyal Telepon Seluler dan Sinyal Internet GSM atau CDMA di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Keberadaan BTS		Kekuatan Sinyal Telepon Seluler			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Kuat	Kuat	Lemah	Tidak Ada Sinyal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	63	45	34	57	17	-

Tabel 8.44. Sambungan

Kabupaten	Sinyal Internet GSM atau CDMA			
	4G/LTE	3G/H/H+	2G/E/GPRS	Tidak Ada Sinyal Internet
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pinrang	51	49	7	1

Tabel 8.45. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Program Televisi dan Radio yang Dapat Diterima Warga di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Program TV				Tidak Ada Program Televisi yang Dapat Diterima
	TVRI	TVRI Daerah	TV Swasta	TV Luar Negeri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	106	48	108	101	-

Tabel 8.45. Sambungan

Kabupaten	Program Radio		
	RRI	RRI Daerah	Radio Swasta/Komunitas
(1)	(7)	(8)	(9)
Pinrang	91	83	94

Tabel 8.46. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Komunikasi di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Warnet	Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos	Pos Keliling	Perusahaan Jasa Ekspedisi Swasta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	36	11	14	8

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab IX

Ekonomi

Ekonomi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel ekonomi, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Koperasi	adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip: a. Keanggotaannya sukarela dan terbuka; b. Pengelolaannya dilakukan secara demokratis; c. Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil, sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan e. Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
Mini Market	adalah tempat usaha yang menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan sistem pelayanan mandiri dan semua barang memiliki label harga, dengan luas bangunan kurang dari 400 m ² .
Restoran	adalah tempat usaha yang mempergunakan seluruh bangunan secara permanen untuk menyediakan jasa pangan yang pengolahannya dan penyajiannya secara langsung di tempat

	sesuai dengan keinginan para pengguna jasa. Restoran mempunyai ciri bahwa pembeli dikenakan pajak. Izin restoran dan kualifikasinya diberikan oleh Ditjen Pariwisata atau Kanwil Parpostel setempat.
Rumah Makan	adalah tempat usaha yang menyediakan jasa pangan yang pengolahan makanannya bisa dilakukan di luar rumah makan. Rumah makan mempunyai ciri pembeli biasanya dikenakan pajak. Izin rumah makan diberikan oleh Dinas Pariwisata Daerah atau Direktorat Perekonomian/Bagian Perekonomian Pemerintah daerah setempat.
Warung/ Kedai Makanan Minuman	adalah tempat usaha yang menjual makanan dan minuman siap saji yang dijual di bangunan yang tetap dan tidak mempunyai surat ijin usaha. Ciri utama dari warung/ kedai makanan minuman adalah pembeli biasanya tidak dikenakan pajak.
Toko/ Warung Kelontong	adalah tempat usaha di bangunan tetap yang menjual barang keperluan sehari-hari secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri dikelola oleh satu penjual.
Toko/warung kelontong yang menjual bahan pangan (sembako)	adalah tempat usaha di bangunan tetap yang khusus menjual bahan pangan (sembako) secara eceran, tidak mempunyai sistem pelayanan mandiri dan dikelola oleh satu penjual.
Hotel	adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan, penyedia makanan dan minuman serta jasa lainnya (seperti restoran, binatu, d.l.l) bagi masyarakat umum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha sebagai hotel.
Penginapan (Hostel/Motel/Losmen/Wisma)	adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau keseluruhan bangunan untuk jasa pelayanan penginapan bagi umum, biasanya tanpa fasilitas pelayanan makan minum yang dikelola secara komersial dengan izin usaha bukan hotel.
Kelompok Pertokoan	adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal sepuluh toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya bisa lebih dari satu.
Pasar dengan Bangunan Permanen/ Semi Permanen	adalah pasar yang menggunakan bangunan tetap dan memiliki lantai, atap, baik berdinding maupun tidak

Pasar Tanpa Bangunan	adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, termasuk pasar terapung
Kios yang Menjual Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)	adalah tempat penjualan pupuk, bibit, dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dibedakan menurut kepemilikan (KUD, BUMDes, atau nonKUD).
Fasilitas Perkreditan	adalah fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. Tidak termasuk pinjaman dari perorangan
Industri Kecil dan Mikro	dikelompokkan menurut bahan baku utama dengan tenaga kerja kurang dari dua puluh pekerja
	<p>a. Industri dari Kulit adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kulit. Contoh pembuatan tas, sepatu, sandal, dan sebagainya</p> <p>b. Industri dari Kayu adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari kayu dan sejenisnya, misalnya industri pembuatan meubel/furnitur, mainan dari kayu, lantai dari kayu, d.s.b. Ukiran tidak termasuk barang industri dari kayu karena termasuk barang seni</p> <p>c. Industri Logam Mulia dan Bahan dari Logam adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari logam mulia dan bahan bahan dari logam, misalnya pembuatan anting-anting, gelang, cincin dan pembuatan perhiasan lainnya dari emas atau perak serta bahan bahan dari logam (misal peralatan rumah tangga)</p> <p>d. Industri Anyaman adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya, misalnya keset kaki, tikar, tas, hiasan dinding, keranjang, topi, kipas, dan sebagainya</p> <p>e. Industri Gerabah/Keramik/Batu adalah industri yang bahan baku utamanya berasal dari gerabah/keramik/porselen/batu dan sejenisnya, misalnya alat-alat dapur yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar (misal kendi, genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, d.s.b). Tidak termasuk pembuatan barang seni, misalnya patung, gapura, d.l.l.</p> <p>f. Industri dari Kain/Tenun adalah industri yang bahan baku</p>

	<p>utamanya berasal dari kain/benang dan sejenisnya</p> <p>g. Industri Makanan dan Minuman adalah industri yang menghasilkan produk makanan/minuman dan sejenisnya, termasuk pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, penggilingan padi-padian, d.l.l</p>
Bank	adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
Bank Umum	adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan).
Bank Perkreditan Rakyat	adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	adalah lembaga keuangan mikro yang bersifat informal yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil.
Pegadaian	adalah badan usaha yang secara resmi memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Menurut Undang- undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak
Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	adalah mesin elektronik yang dapat melayani nasabah bank untuk melakukan berbagai kegiatan perbankan (mengambil uang, transfer, mengecek rekening tabungan, d.l.l) secara mandiri tanpa perlu dilayani oleh petugas bank
Bengkel mobil/motor	adalah tempat yang menyediakan ruang dan peralatan untuk melakukan konstruksi atau manufaktur dan memperbaiki mobil atau motor.
Salon Kecantikan	adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Variasi lain dari jenis usaha salon kecantikan adalah

	salon rambut, dan salon tangan dan kuku (pedikur dan manikur)
Agen tiket/travel/biro perjalanan	adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur dan menyediakan pelayanan bagi seseorang maupun sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata.
Agen Bank	adalah pihak yang bekerjasama dengan Bank penyelenggara Laku Pandai yang menjadi kepanjangan tangan Bank untuk menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif sesuai yang diperjanjikan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Variabel Ekonomi hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 9.47. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Koperasi di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Koperasi Unit Desa	Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat	Koperasi Simpan Pinjam	Koperasi Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	8	2	18	10

Tabel 9.48. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Perdagangan dan Akomodasi di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Sarana Perdagangan		
	Mini Market	Restoran/Rumah Makan	Warung/Kedai Makanan Minuman
(1)	(2)	(3)	(4)
Pinrang	15	3	76

Tabel 9.48. Sambungan

Kabupaten	Sarana Perdagangan		Sarana Akomodasi	
	Toko/Warung Kelontong	Toko/Warung Kelontong yang Menjual Bahan Pangan	Hotel	Penginapan
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	107	90	2	5

Tabel 9.49. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Kelompok Pertokoan, Pasar, dan Kios Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Kelompok Pertokoan	Pasar dengan Bangunan	Pasar Tanpa Bangunan	Tidak Ada Kelompok Pertokoan dan Pasar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	9	40	7	59

Tabel 9.49. Sambungan

Kabupaten	Kios Sarana Produksi Pertanian		
	KUD	BUM Desa	Non-KUD/BUM Desa
(1)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	1	12	71

Tabel 9.50. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Fasilitas Perkreditan Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang 2018

Kabupaten	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKEP-E)	Kredit Usaha Kecil (KUK)	Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	100	10	38	19

Tabel 9.51. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan dan Jenis Industri Kecil dan Mikro Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang 2018

Kabupaten	Industri dari Kulit	Industri dari Kayu	Industri Logam Mulia dan Bahan dari logam	Industri Anyaman	Industri Gerabah/ Keramik /Batu	Industri dari Kain/ Tenun	Industri Makanan dan Minuman	Industri Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pinrang	1	68	43	10	47	62	86	7

Tabel 9.52. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Bank di Kabupaten Pinrang 2018

Kabupaten	Jenis Bank			Tidak Ada Bank
	Bank Umum Pemerintah	Bank Umum Swasta	Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	17	2	1	90

Tabel 9.53. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Sarana Penunjang Ekonomi di Kabupaten Pinrang 2018

Kabupaten	Baitul Maal Wa Tamwil	Pegadaian	Anjungan Tunai Mandiri	Bengkel Mobil/Motor	Salon Kecantikan	Agen Tiket/Travel/Biro Perjalanan	Agen Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	5	14	21	98	0	20	56

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab X

Keamanan

Keamanan

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel ekonomi, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Perkelahian Massal	adalah perkelahian yang terjadi secara massal melibatkan banyak pelaku antara lain: antar kelompok masyarakat, antar pelajar, antar suku, atau lainnya yang terjadi di desa selama setahun terakhir
Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal	adalah orang atau sekelompok orang yang berinisiatif secara aktif untuk mendamaikan massa yang sedang bertikai. a. Aparat Keamanan meliputi aparat kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Satuan Pengamanan (Satpam), dan sebagainya. b. Aparat Pemerintah meliputi aparatur pemerintah daerah, kecamatan, desa dan sebagainya. c. Tokoh Masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya. Contoh: Ketua RT/RW, Ketua Adat, pengurus ormas, dan sebagainya. d. Tokoh Agama adalah orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: ulama/ustadz, pendeta, dan sebagainya.
Tindak Kejahatan	adalah segala tindakan yang disengaja/tidak, telah terjadi/ baru percobaan, yang dapat merugikan orang lain dalam hal badan, jiwa, harta, benda, kehormatan dan lainnya serta tindakan

	tersebut dapat diancam hukuman penjara/kurungan. Tindak kejahatan mencakup pencurian, penipuan, penganiayaan, dan sebagainya
Pos Polisi	<p>adalah tempat polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah sekitar, termasuk Polisi Sektor (Polsek), Polisi Resort (Polres), dan Polisi Daerah (Polda).</p> <p>a. Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan.</p> <p>b. Kepolisian Resor (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten.</p> <p>c. Kepolisian Daerah (Polda) adalah struktur komando Kepolisian Indonesia di tingkat provinsi.</p>

<https://pinrangkab.bps.go.id/>

Variabel Keamanan hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 10.54. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Perkelahian Massal yang Terjadi Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Antar Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat Antar Desa/Kelurahan	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Keamanan	Kelompok Masyarakat dengan Aparat Pemerintah	Pelajar/Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pinrang	2	-	-	-	1	-	-

Tabel 10.55. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Perkelahian Massal dan Kategori Korban Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Desa yang Mengalami Perkelahian Massal	Jenis Korban	
		Meninggal	Luka-luka
(1)	(2)	(3)	(4)
Pinrang	3	1	1

Tabel 10.56. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Inisiator Penyelesaian Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Aparat Keamanan	Aparat Pemerintah	Tokoh Masyarakat	Tokoh Agama	Lainnya	Tidak Ada Inisiaor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	1	1	-	-	-	1

Tabel 10.57. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Kejadian Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Jenis Tindak Kejahatan di Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan	Penipuan/Penggelapan	Penganiayaan	Pembakaran	Perkosaan/Kejahatan Terhadap Kesusilaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	61	8	26	19	-	4

Tabel 10.57 Sambungan

Kabupaten	Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	Perjudian	Pembunuhan	Perdagangan Orang	Korupsi	Tidak Ada Tindak Kejahatan
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pinrang	40	36	6	-	-	38

Tabel 10.58. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kejadian Tindak Kejahatan yang Paling Sering Terjadi Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Pencurian	Pencurian dengan Kekerasan	Penipuan/Penggelapan	Penganiayaan	Pembakaran	Perkosaan/Kejahatan Terhadap Kesusilaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	39	-	2	1	-	-

Tabel 10.58 Sambungan

Kabupaten	Penyalahgunaan/Pengedaran Narkoba	Perjudian	Pembunuhan	Perdagangan Orang	Korupsi	Jumlah
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pinrang	19	8	1	-	-	70

Tabel 10.59. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Upaya Warga Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir di Kabupaten Pinrang

Kabupaten	Pembangunan/Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan	Pembentukan/Pengaturan Regu Keamanan	Penambahan Jumlah Anggota Hansip/Linmas	Pelaporan Tamu Menginap Lebih dari 24 Jam	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan dari Inisiatif Warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	58	34	7	14	37

Tabel 10.60. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres, dan Polda)		Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	21	87	38	43	5	1

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab XI

Otonomi Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat

Otonomi Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel ekonomi, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Sistem Informasi Desa	meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Sistem Informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.
Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)	merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa.
Dana Desa Bersumber dari APBN	adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Pendapatan Asli Desa (PAD)	adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. PAD berasal dari penerimaan

	tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat, dan gotong royong masyarakat, termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa.
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	merupakan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit sepuluh persen (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Alokasi Dana Desa (ADD)	adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa.
Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota	adalah bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	Berasal dari seperti pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, luar negeri, swasta, dan lainnya
Aset Desa	<p>adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).</p> <p>Aset desa dapat berupa tanah kas desa/ ulayat; bangunan desa, misalnya: kantor kepala desa, balai desa, d.l.l; pasar desa, misalnya: pasar hewan, pelelangan ikan, dan pelelangan hasil pertanian; atau aset desa lainnya.</p>

Variabel Otonomi Desa dan Program Pemberdayaan Masyarakat hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 11.61. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Sistem Informasi Desa dan Sistem Keuangan Desa di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Sistem Informasi Desa			Sistem Keuangan Desa		
	Ada, Diperbaharui	Ada, Tidak Diperbaharui	Tidak Ada	Ada, Diperbaharui	Ada, Tidak Diperbaharui	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	32	9	28	57	8	4

Tabel 11.62. Banyaknya Desa Menurut Sumber Pendapatan Desa Tahun 2017

Kabupaten	Dana Desa Bersumber dari APBN	Pendapatan Asli Desa (PADes)	Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Alokasi Dana Desa (ADD)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	69	15	7	67

Tabel 11.62. Sambungan

Kabupaten	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pinrang	2	53	1	2

Tabel 11.63. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 2018, dan Peraturan Kepala Desa 2017

Kabupaten	Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa 2018	Peraturan Kepala Desa 2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Pinrang	65	69	44

Tabel 11.64. Banyaknya Desa Menurut Kepemilikan Aset Desa, 2018

Kabupaten	Tanah Kas Desa/Ulayat	Bangunan Milik Desa	Pasar Desa	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	31	68	1	27

Tabel 11.65. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Kerjasama Desa Tahun 2018

Kabupaten	Keberadaan Kerjasama	
	Antar Desa	Desa dengan Pihak Ketiga
(1)	(2)	(3)
Pinrang	21	17

Tabel 11.66. Banyaknya Desa Menurut Keberadaan Pendamping Desa Tahun 2018

Kabupaten	Ada, Aktif	Ada, Tidak Aktif	Tidak Ada	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	64	1	4	69

Tabel 11.67. Program/Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan yang Selain Bersumber dari Dana Desa Selama Tahun 2015-2017

Kabupaten	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Pemberdayaan
(1)	(2)	(3)
Pinrang	91	50

<https://pinrangkab.bps.go.id>

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Bab XII

Keterangan Pemerintah Desa

Keterangan Pemerintah Desa

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan mengenai variabel ekonomi, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Pemerintah Desa	adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).
Kepala Desa/Lurah	adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Sekretaris Desa/Kelurahan	berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan
Pemimpin Sekretariat Desa/Kelurahan	adalah sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretariat desa/ kelurahan paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan

Pelaksana Kewilayahan	merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan
Pelaksana Teknis	merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Variabel Keterangan Pemerintah Desa hasil dari pendataan Potensi Desa disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 12.68. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pemerintah Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Kepala Desa/Lurah	Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	Pelaksana Kewilayahan	Pelaksana Teknis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pinrang	105	105	108	106

Tabel 12.69. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Kepala Desa/Lurah			Sekretaris Desa/Lurah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pinrang	100	5	105	66	39	105

Tabel 12.70. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kelompok Umur Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Kelompok Umur (Tahun)											
	Kepala Desa/Lurah						Sekretaris Desa/Lurah					
	≤ 24	25-34	35-44	45-54	55 +	Jumlah	≤ 24	25-34	35-44	45-54	55 +	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pinrang	-	10	35	48	12	105	-	7	41	45	12	105

Tabel 12.71. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat Sekolah		
			SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMU dan Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	-	-	-	1	47

Tabel 12.71. Sambungan

Kabupaten	Tamat Sekolah				Jumlah
	Akademi/DIII	Diploma IV/S1	S2	S3	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pinrang	2	46	9	-	105

Tabel 12.72. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Sekretaris Desa/Kelurahan di Kabupaten Pinrang, 2018

Kabupaten	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat Sekolah		
			SD dan Sederajat	SMP dan Sederajat	SMU dan Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pinrang	-	-	-	1	41

Tabel 12.72. Sambungan

Kabupaten	Tamat Sekolah				Jumlah
	Akademi/DIII	Diploma IV/S1	S2	S3	
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pinrang	4	57	2	-	105

<https://pinrangkab.bps.go.id>

Lampiran Kuesioner Podes 2018-Desa

<https://pinrangkab.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

PODES2018- DESA
Disimpan di BPS Kabupaten/Kota

PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2018

RAHASIA

I. KETERANGAN TEMPAT				
101	Provinsi			<input type="text"/>
102	Kabupaten/Kota *)			<input type="text"/>
103	Kecamatan			<input type="text"/>
104	Desa/Kelurahan *)			<input type="text"/>
105	Status Daerah	<i>Perkotaan - 1</i>	<i>Perdesaan - 2</i>	<input type="checkbox"/>
106	Status definitif desa dan operasional desa/kelurahan:			
	a. Ada wilayah desa/kelurahan dengan batas yang jelas	<i>Ya - 1</i>	<i>Tidak - 2</i>	<input type="checkbox"/>
	b. Ada penduduk yang menetap di wilayah desa/kelurahan	<i>Ya - 3</i>	<i>Tidak - 4</i>	<input type="checkbox"/>
	c. Ada pemerintah desa/kelurahan	<i>Ya - 5</i>	<i>Tidak - 6</i>	<input type="checkbox"/>
Jika R106 a, b atau c ada yang berkode 2,4, atau 6, maka lanjutkan ke R201 sampai R208 kemudian STOP				
107	Lokasi pelayanan pemerintahan desa/kelurahan:			
	Alamat lengkap		
	 Kode Pos: <input type="text"/>		
II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER				
201	Nama Pencacah			
202	NIP/NIM	<input type="text"/>		
203	Tanggal Pencacahan	Kunjungan I	Kunjungan II	Kunjungan III
204	Tanda Tangan			
205	Nama Pengawas/Pemeriksa			
206	NIP/NIM	<input type="text"/>		
207	Tanggal Pemeriksaan			
208	Tanda Tangan			
209	Narasumber :			
	Nama	Jabatan	No. Telepon	Email
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			

*) Coret yang tidak sesuai

**DAFTAR INI DIISI OLEH PETUGAS
BERDASARKAN HASIL PENCACAHAN/
WAWANCARA DENGAN NARASUMBER TERKAIT
YANG BERWENANG DAN RELEVAN, SERTA
PENELUSURAN DOKUMEN DESA/KELURAHAN**

....., Mei 2018
Mengetahui
Kepala Desa/Lurah*)

Nama dan Stempel

V. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

501	<p>a. Jumlah keluarga pengguna listrik:</p> <p>1. PLN (Perusahaan Listrik Negara) □ □ □ □ □ keluarga</p> <p>2. Non-PLN (misalnya: swasta, swadaya, atau perseorangan) □ □ □ □ □ keluarga</p>																																				
	<p>b. Jumlah keluarga bukan pengguna listrik: □ □ □ □ □ keluarga</p>																																				
502	<p>a. Penerangan di jalan utama desa/kelurahan: □</p> <p style="text-align: center;"><i>Ada, sebagian besar - 1 Ada, sebagian kecil - 2 Tidak ada - 3 → R503</i></p> <p>b. Jenis penerangan di jalan utama desa/kelurahan: □</p> <p style="text-align: center;"><i>Listrik diusahakan oleh pemerintah - 1 Listrik diusahakan oleh non pemerintah - 2 Non listrik - 3</i></p>																																				
503	<p>a. Bahan bakar untuk memasak yang digunakan oleh keluarga:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">1. Gas kota</td> <td style="width: 15%;">Ya - 1</td> <td style="width: 15%;">Tidak - 2</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">1. □</td> </tr> <tr> <td>2. LPG 3 kg</td> <td>Ya - 3</td> <td>Tidak - 4</td> <td style="text-align: right;">2. □</td> </tr> <tr> <td>3. LPG lebih dari 3 kg</td> <td>Ya - 5</td> <td>Tidak - 6</td> <td style="text-align: right;">3. □</td> </tr> <tr> <td>4. Minyak tanah</td> <td>Ya - 7</td> <td>Tidak - 8</td> <td style="text-align: right;">4. □</td> </tr> <tr> <td>5. Kayu bakar</td> <td>Ya - 1</td> <td>Tidak - 2</td> <td style="text-align: right;">5. □</td> </tr> <tr> <td>6. Lainnya</td> <td>Ya - 3</td> <td>Tidak - 4</td> <td style="text-align: right;">6. □</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;"><i>(tuliskan, misalnya: batu bara, arang, dll.)</i></p> <p>b. Bahan bakar untuk memasak sebagian besar keluarga: (Pilih salah satu kode pada R503a yang dijawab "Ya") □</p> <p>c. Jika R503a.5 berkode 1, cara memperoleh kayu bakar oleh sebagian besar keluarga:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Pembelian</td> <td style="width: 15%;">- 1</td> <td style="width: 15%;">Pengambilan dari luar kawasan hutan/hutan</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">- 3</td> </tr> <tr> <td>Pengambilan dari kawasan hutan/hutan</td> <td>- 2</td> <td>Lainnya</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;"><i>(tuliskan)</i></p>	1. Gas kota	Ya - 1	Tidak - 2	1. □	2. LPG 3 kg	Ya - 3	Tidak - 4	2. □	3. LPG lebih dari 3 kg	Ya - 5	Tidak - 6	3. □	4. Minyak tanah	Ya - 7	Tidak - 8	4. □	5. Kayu bakar	Ya - 1	Tidak - 2	5. □	6. Lainnya	Ya - 3	Tidak - 4	6. □	Pembelian	- 1	Pengambilan dari luar kawasan hutan/hutan	- 3	Pengambilan dari kawasan hutan/hutan	- 2	Lainnya	- 4				
1. Gas kota	Ya - 1	Tidak - 2	1. □																																		
2. LPG 3 kg	Ya - 3	Tidak - 4	2. □																																		
3. LPG lebih dari 3 kg	Ya - 5	Tidak - 6	3. □																																		
4. Minyak tanah	Ya - 7	Tidak - 8	4. □																																		
5. Kayu bakar	Ya - 1	Tidak - 2	5. □																																		
6. Lainnya	Ya - 3	Tidak - 4	6. □																																		
Pembelian	- 1	Pengambilan dari luar kawasan hutan/hutan	- 3																																		
Pengambilan dari kawasan hutan/hutan	- 2	Lainnya	- 4																																		
504	<p>a. Tempat buang sampah keluarga:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">1. Tempat sampah, kemudian diangkut</td> <td style="width: 15%;">Ya - 1</td> <td style="width: 15%;">Tidak - 2</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">1. □</td> </tr> <tr> <td>2. Dalam lubang atau dibakar</td> <td>Ya - 3</td> <td>Tidak - 4</td> <td style="text-align: right;">2. □</td> </tr> <tr> <td>3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut</td> <td>Ya - 5</td> <td>Tidak - 6</td> <td style="text-align: right;">3. □</td> </tr> <tr> <td>4. Drainase (got/selokan)</td> <td>Ya - 7</td> <td>Tidak - 8</td> <td style="text-align: right;">4. □</td> </tr> <tr> <td>5. Lainnya</td> <td>Ya - 1</td> <td>Tidak - 2</td> <td style="text-align: right;">5. □</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;"><i>(tuliskan)</i></p> <p>b. Tempat buang sampah sebagian besar keluarga (Pilih salah satu kode pada R504a yang dijawab "Ya"): □</p> <p>c. Tempat pembuangan sampah sementara (TPS): □</p> <p style="text-align: center;"><i>Ada, digunakan - 1 Ada, tidak digunakan - 2 Tidak ada - 3</i></p>	1. Tempat sampah, kemudian diangkut	Ya - 1	Tidak - 2	1. □	2. Dalam lubang atau dibakar	Ya - 3	Tidak - 4	2. □	3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut	Ya - 5	Tidak - 6	3. □	4. Drainase (got/selokan)	Ya - 7	Tidak - 8	4. □	5. Lainnya	Ya - 1	Tidak - 2	5. □																
1. Tempat sampah, kemudian diangkut	Ya - 1	Tidak - 2	1. □																																		
2. Dalam lubang atau dibakar	Ya - 3	Tidak - 4	2. □																																		
3. Sungai/saluran irigasi/danau/laut	Ya - 5	Tidak - 6	3. □																																		
4. Drainase (got/selokan)	Ya - 7	Tidak - 8	4. □																																		
5. Lainnya	Ya - 1	Tidak - 2	5. □																																		
505	<p>a. Penggunaan fasilitas buang air besar sebagian besar keluarga di desa/kelurahan: □</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Jamban sendiri</td> <td style="width: 15%;">- 1</td> <td style="width: 15%;">Jamban umum</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">- 3</td> </tr> <tr> <td>Jamban bersama</td> <td>- 2</td> <td>Bukan jamban</td> <td style="text-align: right;">- 4 → R506</td> </tr> </table> <p>b. Tempat pembuangan akhir tinja sebagian besar keluarga:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Tangki/instalasi pengelolaan air limbah</td> <td style="width: 15%;">- 1</td> <td style="width: 15%;">Lubang tanah</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">- 3</td> </tr> <tr> <td>Sawah/kolam/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/kebun</td> <td>- 2</td> <td>Lainnya</td> <td style="text-align: right;">- 4</td> </tr> </table>	Jamban sendiri	- 1	Jamban umum	- 3	Jamban bersama	- 2	Bukan jamban	- 4 → R506	Tangki/instalasi pengelolaan air limbah	- 1	Lubang tanah	- 3	Sawah/kolam/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/kebun	- 2	Lainnya	- 4																				
Jamban sendiri	- 1	Jamban umum	- 3																																		
Jamban bersama	- 2	Bukan jamban	- 4 → R506																																		
Tangki/instalasi pengelolaan air limbah	- 1	Lubang tanah	- 3																																		
Sawah/kolam/sungai/danau/laut atau pantai/tanah lapang/kebun	- 2	Lainnya	- 4																																		
506	<p>Tempat/saluran pembuangan limbah cair dari air mandi/cuci sebagian besar keluarga:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Lubang resapan</td> <td style="width: 15%;">- 1</td> <td style="width: 15%;">Dalam lubang atau tanah terbuka</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">- 4</td> </tr> <tr> <td>Drainase (got/selokan)</td> <td>- 2</td> <td>Lainnya</td> <td style="text-align: right;">- 5</td> </tr> <tr> <td>Sungai/saluran irigasi/danau/laut</td> <td>- 3</td> <td style="text-align: center; font-size: small;"><i>(tuliskan)</i></td> <td></td> </tr> </table>	Lubang resapan	- 1	Dalam lubang atau tanah terbuka	- 4	Drainase (got/selokan)	- 2	Lainnya	- 5	Sungai/saluran irigasi/danau/laut	- 3	<i>(tuliskan)</i>																									
Lubang resapan	- 1	Dalam lubang atau tanah terbuka	- 4																																		
Drainase (got/selokan)	- 2	Lainnya	- 5																																		
Sungai/saluran irigasi/danau/laut	- 3	<i>(tuliskan)</i>																																			
507	<p>a. Sumber air untuk minum sebagian besar keluarga berasal dari:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Air kemasan bermerek</td> <td style="width: 15%;">- 1</td> <td style="width: 15%;">Sumur</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">- 6</td> </tr> <tr> <td>Air isi ulang</td> <td>- 2</td> <td>Mata air</td> <td style="text-align: right;">- 7</td> </tr> <tr> <td>Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)</td> <td>- 3</td> <td>Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> <tr> <td>Ledeng tanpa meteran</td> <td>- 4</td> <td>Air hujan</td> <td style="text-align: right;">- 9</td> </tr> <tr> <td>Sumur bor atau pompa</td> <td>- 5</td> <td>Lainnya</td> <td style="text-align: right;">- 10</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;"><i>(tuliskan)</i></p> <p>b. Sumber air untuk mandi/cuci sebagian besar keluarga berasal dari:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 35%;">Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)</td> <td style="width: 15%;">- 1</td> <td style="width: 15%;">Mata air</td> <td style="width: 35%; text-align: right;">- 5</td> </tr> <tr> <td>Ledeng tanpa meteran</td> <td>- 2</td> <td>Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan</td> <td style="text-align: right;">- 6</td> </tr> <tr> <td>Sumur bor atau pompa</td> <td>- 3</td> <td>Air hujan</td> <td style="text-align: right;">- 7</td> </tr> <tr> <td>Sumur</td> <td>- 4</td> <td>Lainnya</td> <td style="text-align: right;">- 8</td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;"><i>(tuliskan)</i></p>	Air kemasan bermerek	- 1	Sumur	- 6	Air isi ulang	- 2	Mata air	- 7	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	- 3	Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan	- 8	Ledeng tanpa meteran	- 4	Air hujan	- 9	Sumur bor atau pompa	- 5	Lainnya	- 10	Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	- 1	Mata air	- 5	Ledeng tanpa meteran	- 2	Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan	- 6	Sumur bor atau pompa	- 3	Air hujan	- 7	Sumur	- 4	Lainnya	- 8
Air kemasan bermerek	- 1	Sumur	- 6																																		
Air isi ulang	- 2	Mata air	- 7																																		
Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	- 3	Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan	- 8																																		
Ledeng tanpa meteran	- 4	Air hujan	- 9																																		
Sumur bor atau pompa	- 5	Lainnya	- 10																																		
Ledeng dengan meteran (PAM/PDAM)	- 1	Mata air	- 5																																		
Ledeng tanpa meteran	- 2	Sungai/danau/kolam/waduk/situ/embung/bendungan	- 6																																		
Sumur bor atau pompa	- 3	Air hujan	- 7																																		
Sumur	- 4	Lainnya	- 8																																		

512	a. Keberadaan permukiman kumuh (sanitasi lingkungan buruk, bangunan padat, dan sebagian besar tidak layak huni) di desa/kelurahan: <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i> → R513 <input type="checkbox"/>	
	b. Jika ada permukiman kumuh:	
	1. Jumlah lokasi	<input type="text"/> lokasi
	2. Jumlah bangunan	<input type="text"/> unit
	3. Jumlah keluarga (isian tidak boleh lebih dari isian R401c)	<input type="text"/> keluarga
513	Pencemaran lingkungan hidup (polusi) di desa/kelurahan selama setahun terakhir :	
	Jika ada kejadian pencemaran lingkungan hidup (kolom (2) berkode 1)	
	Pencemaran lingkungan hidup (polusi)	Kejadian pencemaran lingkungan hidup <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>
		Sumber pencemaran lingkungan hidup yang utama <i>Rumah tangga - 1</i> <i>Pabrik/industri/usaha - 2</i> <i>Lainnya - 3</i> Jika jawaban berkode 3 tuliskan sumber pencemarannya
		Pengaduan warga ke aparat desa/kelurahan <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>
	(1)	(2)
	a. Air	<input type="checkbox"/>
	b. Tanah	<input type="checkbox"/>
	c. Udara	<input type="checkbox"/>
514	Kegiatan pelestarian lingkungan dan pengolahan sampah selama 3 tahun terakhir	
	Jenis Kegiatan	<i>Ada, sebagian warga terlibat - 1</i> <i>Ada, warga tidak terlibat - 2</i> <i>Tidak ada kegiatan - 3</i>
	(1)	(2)
	a. Penanaman/pemeliharaan pepohonan di lahan kritis, penanaman mangrove, dan sejenisnya	<input type="checkbox"/>
	b. Pengolahan/daur ulang sampah/limbah (<i>reuse, recycle</i>)	<input type="checkbox"/>
515	Kebiasaan masyarakat membakar ladang/kebun di desa/kelurahan untuk proses usaha pertanian: <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i> <input type="checkbox"/>	
516	Keberadaan lokasi penggalian Golongan C (misalnya: batu kali, pasir, kapur, kaolin, pasir kuarsa, tanah liat, dll.) di desa/kelurahan: <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i> <input type="checkbox"/>	

VI. BENCANA ALAM DAN MITIGASI BENCANA ALAM

601	Kejadian/bencana alam (mengganggu kehidupan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat) yang terjadi selama 3 tahun terakhir :							
	Kejadian/bencana alam	Kejadian <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Jika ada kejadian/bencana alam (kolom (2) berkode 1)					
			Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017	
			Banyak kejadian	Korban jiwa	Banyak kejadian	Korban jiwa	Banyak kejadian	Korban jiwa
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	a. Tanah longsor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	b. Banjir	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	c. Banjir bandang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	d. Gempa bumi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	e. Tsunami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	f. Gelombang pasang laut	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	g. Angin puyuh/puting beliung/topan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	h. Gunung meletus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	i. Kebakaran hutan dan lahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	j. Kekeringan (lahan)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

602	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di desa/kelurahan:				
a.	Sistem peringatan dini bencana alam	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	
b.	Sistem peringatan dini khusus tsunami	Bukan wilayah potensi tsunami - 0	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
c.	Perlengkapan keselamatan (perahu karet, tenda, masker, dll.)	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>	
d.	Rambu-rambu dan jalur evakuasi bencana	Ada - 7	Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/>	
e.	Pembuatan, perawatan, atau normalisasi: sungai, kanal, tanggul, parit, drainase, waduk, pantai, dll.	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>	

VII. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

701	Keberadaan sarana pendidikan menurut jenjang pendidikan di desa/kelurahan				
Jenis/jenjang pendidikan	Jumlah lembaga pendidikan		Jika tidak ada lembaga pendidikan di desa/kelurahan (<i>kolom (2) dan kolom (3) terisi 0</i>), jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana pendidikan terdekat		
	Negeri	Swasta	Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
a.	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
b.	TK/RA/BA	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
c.	SD/MI	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
d.	SMP/MTs	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
e.	SMU/MA	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
f.	SMK	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
g.	Akademi/Perguruan Tinggi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
h.	SDLB	<input type="checkbox"/>			
i.	SMPLB	<input type="checkbox"/>			
j.	SMALB	<input type="checkbox"/>			
k.	Pondok Pesantren	<input type="text"/>			
l.	Madrasah Diniyah	<input type="text"/>			
m.	Seminari/sejenisnya	<input type="checkbox"/>			
Kode kolom (5): Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4					

702	a.	Kegiatan pemberantasan buta aksara/keaksaraan fungsional (KF) selama 3 tahun terakhir :	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	b.	Kegiatan pendidikan Paket A/B/C selama setahun terakhir :	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
	c.	Kelompok Bermain (<i>Play Group</i>) :	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>
	d.	Taman Penitipan Anak (TPA) :	Ada - 7	Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/>
	e.	Taman Pendidikan Al-Qur'an:	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	f.	Taman Bacaan Masyarakat (TBM) :	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>

703	Keberadaan jenis pendidikan keterampilan di desa/kelurahan			
	Jenis pendidikan keterampilan	Jumlah		
		Milik desa/kelurahan	Bukan milik desa/kelurahan	
	(1)	(2)	(3)	
	a. Bahasa asing	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	b. Komputer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	c. Menjahit/tata busana	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	d. Kecantikan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
e. Montir mobil/motor	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
f. Elektronika	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
g. Lainnya	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
	<i>(tuliskan, misalnya: tataboga, stir mobil, mengetik, akuntansi, dll.)</i>			
704	Keberadaan sarana kesehatan di desa/kelurahan			
	Sarana kesehatan	Jumlah sarana kesehatan di desa/kelurahan	Jika tidak ada sarana kesehatan di desa/kelurahan [kolom (2) terisi 0] , Jarak dan kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan terdekat	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Rumah sakit	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Rumah sakit bersalin	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Puskesmas dengan rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Puskesmas tanpa rawat inap	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Puskesmas pembantu	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Poliklinik/balai pengobatan	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Tempat praktik dokter	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Rumah bersalin	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Tempat praktik bidan	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Poskesdes (pos kesehatan desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	k. Polindes (pondok bersalin desa)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
	l. Apotek	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>
m. Toko khusus obat/jamu	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kode kolom (4): Sangat mudah -1 Mudah -2 Sulit -3 Sangat sulit -4				
705	Jumlah posyandu/posbindu menurut kegiatan/pelayanan selama setahun terakhir :			
	a. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap sebulan sekali:	<input type="text"/>	unit	
	b. Posyandu dengan kegiatan/pelayanan setiap 2 bulan sekali atau lebih:	<input type="text"/>	unit	
	c. Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu):	<input type="text"/>	unit	
706	Tenaga kesehatan yang tinggal/menetap di desa/kelurahan:			
	a. Dokter umum/spesialis:	<input type="text"/>	orang	
	1. Dokter pria	<input type="text"/>	orang	
	2. Dokter wanita	<input type="text"/>	orang	
	b. Dokter gigi (tidak termasuk tukang gigi):	<input type="text"/>	orang	
c. Bidan:	<input type="text"/>	orang		
d. Tenaga kesehatan lainnya: (misalnya: apoteker/asisten apoteker, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, perawat, dll.)	<input type="text"/>	orang		

707	Keberadaan bidan desa (BDD):	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
708	Dukun bayi/dukun bersalin/paraji yang tinggal/menetap di desa/kelurahan:	<input type="text"/> orang		
709	Kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit selama setahun terakhir			
	Jenis KLB/wabah penyakit (KLB: timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, ditetapkan oleh pemerintah)	Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada KLB atau wabah, (kolom (2) berkode 1)	
			Jumlah penderita	Jumlah penderita yang meninggal
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Muntaber/diare	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Demam berdarah	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Campak	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Malaria	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Flu burung/SARS	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Hepatitis E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
g. Difteri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
h. Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<i>(tuliskan, misalnya: chikungunya, leptospirosis, kolera, dll.)</i>				
710	Jumlah warga penderita gizi buruk (<i>marasmus</i> dan <i>kwashiorkor</i>) pada tahun 2017 :	<input type="text"/> orang		
711	a. Jumlah warga peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Jamkesda pada tahun 2017 :	<input type="text"/> orang		
	b. Jumlah surat miskin/SKTM yang dikeluarkan desa/kelurahan selama tahun 2017 :	<input type="text"/> surat		
	c. Jumlah keluarga miskin menurut kepala desa/lurah selama tahun 2017 : (isian tidak boleh lebih dari isian R401c)	<input type="text"/> keluarga		

VIII. SOSIAL BUDAYA

801	Keberadaan warga yang menganut agama/kepercayaan di desa/kelurahan:			
	Kode	Nama agama/kepercayaan		Keberadaan
	(1)	(2)		(3)
	1	Islam	Ada - 1 Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	2	Kristen	Ada - 3 Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
	3	Katolik	Ada - 5 Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>
	4	Buddha	Ada - 7 Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/>
	5	Hindu	Ada - 1 Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	6	Konghucu	Ada - 3 Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
7	Aliran penghayat kepercayaan..... <i>(tuliskan)</i>	Ada - 5 Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>	
802	Agama/kepercayaan yang dianut oleh sebagian besar warga di desa/kelurahan: (pilih salah satu kode pada R801 kolom (1) yang isian kolom (3) nya berkode 1, 3, 5, atau 7)			<input type="checkbox"/>
803	Jumlah tempat ibadah di desa/kelurahan:			
	Jenis tempat ibadah	Jumlah	Jenis tempat ibadah	Jumlah
	(1)	(2)	(1)	(2)
	a. Masjid	<input type="text"/>	f. Pura	<input type="text"/>
	b. Surau/Langgar/Musala	<input type="text"/>	g. Wihara	<input type="text"/>
	c. Gereja Kristen	<input type="text"/>	h. Kelenteng	<input type="text"/>
	d. Gereja Katolik	<input type="text"/>	i. Lainnya,	<input type="text"/>
e. Kapel	<input type="text"/>	<i>(tuliskan, misalnya: Balai Basarah, dll.)</i>		

804	a. 1. Warga desa/kelurahan terdiri dari beberapa suku/etnis: <i>Ya - 1</i> <i>Tidak - 2</i> <input type="checkbox"/>		Kode [Diisi oleh PML] <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	2. Tuliskan tiga nama suku/etnis utama secara berurutan dari yang terbesar: a) b) c)		
805	b. 1. Warga desa/kelurahan berkomunikasi sehari-hari menggunakan beberapa bahasa: <i>Ya - 1</i> <i>Tidak - 2</i> <input type="checkbox"/>		Kode [Diisi oleh PML] <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	2. Bahasa sehari-hari sebagian besar warga di desa/kelurahan: (tuliskan)		
805	Banyaknya penyandang cacat di desa/kelurahan:		
	Jenis kecacatan		Banyaknya penyandang cacat
	a. Tunanetra (buta)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	b. Tunarungu (tuli)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	c. Tunawicara (bisu)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	d. Tunarungu-wicara (tuli-bisu)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	e. Tunadaksa (cacat tubuh): kelumpuhan/kelainan/ketidakkengkapan anggota gerak		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	f. Tunagrahita (cacat mental, keterbelakangan mental)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	g. Tunalaras (eks-sakit jiwa, mengalami hambatan/gangguan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	h. Cacat eks-sakit kusta: pernah mengalami sakit kusta dan telah dinyatakan sembuh oleh dokter		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
i. Cacat ganda (cacat fisik-mental): cacat fisik (buta, tuli, bisu, bisu-tuli atau cacat tubuh) dan cacat mental (tunagrahita atau tunalaras)		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
806	Jumlah orang yang dipasung di desa/kelurahan: <input type="text"/> orang		
807	Situs cagar budaya di desa/kelurahan: <i>Ada, dikelola - 1</i> <i>Ada, jarang dikelola - 2</i> <i>Ada, tidak dikelola - 3</i> <i>Tidak ada - 4</i> <input type="checkbox"/>		
808	Ruang publik terbuka yang peruntukan utamanya sebagai tempat bagi warga desa/kelurahan untuk bersantai/bermain tanpa perlu membayar (misalnya: lapangan terbuka/alun-alun, taman, dll.): <i>Ada, dikelola - 1</i> <i>Ada, tidak dikelola - 2</i> <i>Tidak ada - 3</i> <input type="checkbox"/>		
809	a. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk kepentingan umum/komunitas (seperti: kerja bakti, siskamling, pesta rakyat, dll) selama 1 tahun terakhir : <i>Ada, sebagian besar warga terlibat - 1</i> <i>Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2</i> <i>Tidak ada kebiasaan - 3</i> <input type="checkbox"/>		
	b. Kebiasaan dan keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong di desa/kelurahan untuk membantu warga yang sedang mengalami musibah (seperti kematian, kesakitan, kecelakaan, dll) selama 1 tahun terakhir : <i>Ada, sebagian besar warga terlibat - 1</i> <i>Ada, sebagian kecil warga terlibat - 2</i> <i>Tidak ada kebiasaan - 3</i> <input type="checkbox"/>		
810	Keberadaan kearifan lokal yaitu budaya/adat/kebiasaan luhur yang menjadi ciri masyarakat dan masih dipertahankan di desa/kelurahan:		
	Kearifan lokal berkaitan dengan	Nama kearifan lokal	Kearifan lokal berkaitan dengan
	(1)	(2)	(1)
	1. Kehamilan	5. Perkawinan
	2. Kelahiran	6. Kehidupan komunitas
	3. Pekerjaan/pencarian	7. Kematian
	4. Alam/lingkungan hidup

811	Jumlah jenis-jenis lembaga kemasyarakatan desa:			
	Jenis lembaga		Jumlah	
	(1)		(2)	
	a. PKK	<input type="text"/>	d. Kelompok tani	<input type="text"/>
	b. Karang taruna	<input type="text"/>	e. Lembaga pengelolaan air	<input type="text"/>
c. Lembaga adat	<input type="text"/>	f. Kelompok masyarakat (pokmas)	<input type="text"/>	

IX. OLAHRAGA DAN HIBURAN

901	Ketersediaan fasilitas/lapangan dan kelompok kegiatan olahraga di desa/kelurahan:		
	Jenis olahraga	Fasilitas/lapangan olahraga Ada, baik - 1 Ada, rusak parah - 3 Ada, rusak sedang - 2 Tidak ada - 4	Kelompok kegiatan Ada - 1 Tidak ada - 2
	(1)	(2)	(3)
	a. Sepak bola	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Bola voli	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	c. Bulu tangkis	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	d. Bola basket	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	e. Tenis lapangan	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	f. Tenis meja	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	g. Futsal	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	h. Renang	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	i. Bela diri (pencak silat, karate, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	j. Bilyard	<input type="text"/>	<input type="text"/>
k. fitnes, aerobik, dll.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
l. Lainnya..... (tuliskan)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

902	a. Keberadaan pub/diskotek/tempat karaoke yang masih berfungsi: Ada - 1 → R1001 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>
	b. Jika tidak ada pub/diskotek/tempat karaoke, perkiraan jarak ke pub/diskotek/tempat karaoke terdekat : <input type="text"/> , <input type="text"/> km

X. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI

1001	Prasarana dan sarana transportasi antar desa/kelurahan:			
	a. Lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui :	<i>Darat</i> - 1 <i>Air</i> - 2 → R1001c <i>Darat dan air</i> - 3 <i>Udara</i> - 4 → R1001c	<input type="checkbox"/>	
	b. Jika lalu lintas dari/ke desa/kelurahan melalui darat atau darat dan air,			
	1. Jenis permukaan jalan darat antar desa/kelurahan yang terluas:	<i>Aspal/beton</i> - 1 <i>Tanah</i> - 3 <i>Diperkeras (kerikil, batu, dll.)</i> - 2 <i>Lainnya</i> - 4 (tuliskan, misalnya: jalan setapak, kayu/papan, dll.)	<input type="checkbox"/>	
	2. Jalan darat antar desa/kelurahan dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 atau lebih:	<i>Sepanjang tahun</i> - 1 <i>Sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, pasang, dll.)</i> - 2 <i>Selama musim kemarau</i> - 3 <i>Tidak dapat dilalui sepanjang tahun</i> - 4	<input type="checkbox"/>	
	c. Angkutan umum yang melewati desa/kelurahan:			
	1. Keberadaan angkutan umum:	<i>Ada, dengan trayek tetap</i> - 1 <i>Ada, tanpa trayek tetap</i> - 2 <i>Tidak ada angkutan umum</i> - 3 → R1002	<input type="checkbox"/>	
	2. Operasional angkutan umum yang utama:	<i>Setiap hari</i> - 1 <i>Tidak setiap hari</i> - 2	<input type="checkbox"/>	
	3. Jam operasi angkutan umum yang utama:	<i>Siang dan malam hari</i> - 1 <i>Hanya siang hari</i> - 2	<input type="checkbox"/>	

1002	Sarana transportasi dari kantor kepala desa/lurah ke kantor camat/bupati/walikota						
	Sarana transportasi yang biasa digunakan oleh sebagian besar penduduk dari kantor kepala desa/lurah ke	Sarana transportasi yang biasa digunakan [kode]	Jika ada angkutan umum (kolom (2) berkode 1, 3, 5, atau 7)		Jarak tempuh (km)	Waktu tempuh (jam: menit)	Biaya transportasi (000 Rupiah)
		Jenis angkutan umum [kode]	Angkutan umum yang utama [kode]				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	a. Kantor camat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Kantor bupati/walikota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Kantor camat lain terdekat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Kantor bupati/walikota lain terdekat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Kode kolom (2). pilihan boleh lebih dari satu kode: Angkutan umum - 1 Kendaraan pribadi - 2 Jalan kaki, sepeda, dll. - 4		Kode kolom (3), pilihan boleh lebih dari satu kode: Ojek sepeda motor - 1 Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - 2 Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - 4 Pesawat terbang - 8 Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - 16		Kode kolom (4): Ojek sepeda motor - 1 Kendaraan bermotor roda 3 atau lebih - 2 Perahu (bermotor maupun tidak bermotor) - 3 Pesawat terbang - 4 Lainnya (becak, delman, pedati, dll) - 5		
1003	a. Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> keluarga						
	b. Keberadaan warga yang menggunakan telepon seluler/handphone: Sebagian besar warga - 1 Sebagian kecil warga - 2 Tidak ada - 3 <input type="checkbox"/>						
1004	Keberadaan warnet (termasuk game online) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>						
1005	a. Jumlah menara Base Transceiver Station (BTS): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> buah						
	b. Jumlah operator layanan komunikasi telepon seluler/handphone yang menjangkau di desa/kelurahan: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> jenis						
	c. Sinyal telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah desa/kelurahan: Sinyal sangat kuat - 1 Sinyal kuat - 2 Sinyal lemah - 3 Tidak ada sinyal - 4 → R1006 <input type="checkbox"/>						
	d. Sinyal internet GSM atau CDMA telepon seluler/handphone di sebagian besar wilayah di desa/kelurahan: 4G/LTE - 1 3G/H/H+/EVDO - 2 2.5G/E/GPRS - 3 Tidak ada sinyal internet - 4 <input type="checkbox"/>						
1006	a. Komputer/PC/laptop yang masih berfungsi di kantor kepala desa/lurah: Digunakan - 1 Jarang digunakan - 2 Tidak digunakan - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>						
	b. Fasilitas internet di kantor kepala desa/lurah: Berfungsi - 1 Jarang berfungsi - 2 Tidak berfungsi - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>						
1007	a. Kantor pos/pos pembantu/rumah pos: Beroperasi - 1 Jarang beroperasi - 2 Tidak beroperasi - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>						
	b. Layanan pos keliling: Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>						
	c. Perusahaan/agen jasa ekspedisi (pengiriman barang/dokumen) swasta: Beroperasi - 1 Jarang beroperasi - 2 Tidak beroperasi - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>						
1008	Program/siaran TV/radio yang diterima di desa/kelurahan						
	Program/siaran televisi/radio	Program/siaran televisi/radio dapat diterima Ya - 1 Tidak - 2		Jika program/siaran televisi dapat diterima (kolom 2 berkode 1), apakah harus menggunakan parabola/TV kabel? Ya - 1 Tidak - 2			
	(1)	(2)		(3)			
	a. TVRI	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	b. TVRI daerah	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	c. TV swasta	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	d. TV luar negeri	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
	e. RRI	<input type="checkbox"/>					
	f. RRI daerah	<input type="checkbox"/>					
	g. Radio swasta/komunitas	<input type="checkbox"/>					

XI. PENGGUNAAN LAHAN

1101	Luas wilayah desa/kelurahan	:	km ²	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
			(1 Ha= 0,01 km ²)	
1102	Luas lahan menurut jenis penggunaan lahan:			
	a. Lahan pertanian sawah (R1102a.1 + R1102a.2)	:	Ha	<input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
	1. Lahan sawah irigasi	:	Ha	<input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
	2. Lahan sawah nonirigasi (tadah hujan, pasang surut, rawa)	:	Ha	<input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
	b. Lahan pertanian nonsawah (tegal/kebun, ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, perkebunan, peternakan, dll.)	:	Ha	<input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>
	c. Lahan nonpertanian (perumahan, industri, perkantoran, pertokoan, jalan, prasarana umum, lapangan, dll.)	:	Ha	<input type="text"/> , <input type="text"/> <input type="text"/>

XII. EKONOMI

1201	Industri mikro dan kecil (memiliki tenaga kerja kurang dari 20 pekerja) menurut bahan baku utama:	Jumlah
	a. Industri barang dari kulit (tas, sepatu, sandal, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	b. Industri barang dari kayu (meja, kursi, lemari, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	c. Industri barang dari logam mulia atau bahan logam (perabot dan perhiasan dari logam, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	d. Industri barang dari kain/tenun (kerajinan tenun, konveksi, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	e. Industri gerabah/keramik/batu (genteng, batu bata, porselin, tegel, keramik, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	f. Industri anyaman yang terbuat dari rotan/bambu, rumput, pandan, dll. (tikar, tas, hiasan dinding, dan produk lainnya).	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	g. Industri makanan dan minuman (pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah- buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, makanan dan minuman lain, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
	h. Industri lainnya <i>(tuliskan)</i>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> unit
1202	a. Jumlah Sentra Industri:	<input type="text"/> lokasi
	b. Jumlah Lingkungan Industri Kecil (LIK):	<input type="text"/> lokasi
	c. Jumlah Perkampungan Industri Kecil (PIK):	<input type="text"/> lokasi
1203	a. Keberadaan pangkalan/agen/penjual minyak tanah (termasuk penjual minyak tanah keliling):	<i>Ada - 1 Tidak ada - 2</i> <input type="text"/>
	b. Keberadaan pangkalan/agen/penjual LPG (warung, toko, supermarket, penjual gas keliling):	<i>Ada - 3 Tidak ada - 4</i> <input type="text"/>
1204	Jumlah KUD di desa/kelurahan	
	a. KUD yang beroperasi:	<input type="text"/> <input type="text"/> unit
	Jika tidak ada KUD (R1204a =0) → R1205	
	b. KUD yang membeli/menjual hasil/produksi pertanian	<input type="text"/> <input type="text"/> unit
	c. KUD yang menyediakan Kredit Usaha	<input type="text"/> <input type="text"/> unit
	d. KUD yang melakukan kegiatan lainnya	<input type="text"/> <input type="text"/> unit
1205	a. Jumlah koperasi (selain KUD) yang masih aktif/beroperasi:	<input type="text"/> <input type="text"/> unit
	1. Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat (Kopinkra)/Usaha mikro	<input type="text"/> <input type="text"/> unit
	2. Koperasi Simpan Pinjam (Kospin)	<input type="text"/> <input type="text"/> unit
	3. Koperasi lainnya <i>(tuliskan, misalnya koperasi: serbausaha, konsumsi.)</i>	<input type="text"/> <input type="text"/> unit

1205	b. Keberadaan toko/kios yang menjual sarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, cangkul, dll.) di desa/kelurahan:			
	1. Milik KUD	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	2. Milik BUM Desa	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
	3. Selain milik KUD/BUM Desa	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>
1206	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi di desa/kelurahan			
	Jenis sarana dan prasarana ekonomi	Jumlah	Jika tidak ada [kolom (2) terisi 0], Jarak dan akses ke sarana dan prasarana ekonomi terdekat	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Kelompok pertokoan (minimal 10 toko dan mengelompok dalam satu lokasi)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Pasar dengan bangunan permanen (memiliki atap, lantai, dan dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Pasar dengan bangunan semi permanen (memiliki atap dan lantai, tanpa dinding)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Pasar tanpa bangunan (misalnya: pasar subuh, pasar terapung, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Jumlah minimarket/swalayan (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang secara eceran dengan label harga, sistem pelayanan mandiri, luas lantai < 400 m ²)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	f.1. Toko/warung kelontong (tempat usaha di bangunan tetap untuk menjual berbagai jenis barang keperluan sehari-hari secara eceran, tanpa ada sistem pelayanan mandiri)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	2. Toko/warung kelontong yang menjual bahan pangan (sembako)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	g. Restoran/rumah makan (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	h. Warung/kedai makanan minuman (usaha pangan siap saji di bangunan tetap, pembeli biasanya tidak dikenai pajak)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	i. Hotel (menyediakan jasa akomodasi dan ada restoran, penginapan dengan izin usaha sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	j. Penginapan: hostel/motel/losmen/wisma (menyediakan akomodasi, penginapan dengan izin usaha bukan sebagai hotel)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Kode kolom (4) : Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4				
1207	Fasilitas kredit yang diterima warga desa/kelurahan selama setahun terakhir :			
	a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Ada - 1	Tidak ada - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)	Ada - 3	Tidak ada - 4	<input type="checkbox"/>
	c. Kredit Usaha Kecil (KUK)	Ada - 5	Tidak ada - 6	<input type="checkbox"/>
	d. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Ada - 7	Tidak ada - 8	<input type="checkbox"/>
1208	Jumlah sarana lembaga keuangan yang beroperasi di desa/kelurahan			
	Jenis sarana lembaga keuangan	Jumlah	Jika tidak ada [kolom (2) terisi 0], Jarak dan akses ke sarana/lembaga keuangan terdekat	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Bank Umum Pemerintah (BRI, BNI, Mandiri, BPD, BTN)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Bank Umum Swasta (BCA, Permata, Sinarmas, CIMB, dll.)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	<input type="text"/>	<input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	Kode kolom (4) : Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4			

1209	Keberadaan sarana penunjang ekonomi di desa/kelurahan			
	Jenis sarana penunjang ekonomi	Keberadaan <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Jika tidak ada [<i>kolom (2) berkode 2</i>], Jarak dan akses ke sarana penunjang terdekat	
			Jarak (km)	Kemudahan untuk mencapai [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Pegadaian	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Bengkel mobil/motor	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	e. Salon Kecantikan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
f. Agen Tiket/Travel/Biro Perjalanan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
g. Agen Bank	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> , <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
Kode kolom (4): <i>Sangat mudah - 1</i> <i>Mudah - 2</i> <i>Sulit - 3</i> <i>Sangat sulit - 4</i>				

XIII. KEAMANAN

1301	a. Kejadian perkelahian massal di desa/kelurahan selama setahun terakhir : <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i> → R1303 <input type="checkbox"/>				
	b. Jika ada kejadian perkelahian massal, berikut ini keterangan jenis perkelahian massal, jumlah kejadian, dan keberadaan korban manusia selama setahun terakhir :				
	Jenis perkelahian massal	Jumlah	Jika ada perkelahian massal (<i>kolom (2) tidak sama dengan 0</i>)		
			Korban manusia		Penyebab perkelahian [kode]
			Meninggal <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Luka- luka <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Antar kelompok masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	2. Kelompok masyarakat antar desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	3. Kelompok masyarakat dengan aparat keamanan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
4. Kelompok masyarakat dengan aparat pemerintah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
5. Pelajar/mahasiswa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
6. Antar suku	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
7. Lainnya (<i>tuliskan</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Kode kolom (5): Pilihan boleh lebih dari satu.					
<i>Harta - 1</i> <i>Asmara - 4</i> <i>Keramaian (olah raga, hiburan, dll.) - 16</i> <i>Lainnya - 64</i>					
<i>Kekuasaan - 2</i> <i>Ideologi/kepercayaan - 8</i> <i>Ketidakpuasan atas kebijakan/pelayanan - 32</i>					

1302	a. Perkelahian massal yang paling sering terjadi (R1301b kolom (2) yang isiannya paling banyak), apakah sudah diselesaikan/didamaikan?			
	<i>Ya, semuanya - 1</i>	<i>Ya, sebagian - 2</i>	<i>Tidak - 3</i>	<input type="checkbox"/>
b. Upaya penyelesaian perkelahian massal dilakukan oleh: (Pilihan boleh lebih dari satu)				
<i>Aparat keamanan - 1</i> <i>Tokoh masyarakat - 4</i> <i>Lainnya - 16</i>				
<i>Aparat pemerintah - 2</i> <i>Tokoh agama - 8</i> <i>Tidak ada - 32</i> <input type="text"/> <input type="text"/>				

1303	a. Tindak kejahatan yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir :			
	Kode	Jenis tindak kejahatan	Kejadian Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada tindak kejahatan (kolom (3) berkode 1), kecenderungan tindak kejahatan dibanding setahun yang lalu Menurun - 1 Sama saja - 2 Meningkat - 3
	(1)	(2)	(3)	(4)
	01	Pencurian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	02	Pencurian dengan kekerasan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	03	Penipuan/penggelapan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	04	Penganiayaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	05	Pembakaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	06	Perkosaan/kejahatan terhadap kesusilaan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	07	Penyalahgunaan/peredaran narkoba	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	08	Perjudian	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	09	Pembunuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	Perdagangan orang (<i>trafficking</i>)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Korupsi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
b. Dari berbagai kejadian tindak kejahatan (R1303a kolom (3) berkode 1), tindak kejahatan yang paling sering terjadi: (salin kode pada R1303a kolom (1))				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
1304	Kegiatan warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan lingkungan di desa/kelurahan selama setahun terakhir :			
	a. Pembangunan/pemeliharaan pos keamanan lingkungan:	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
	b. Pembentukan/pengaturan regu keamanan:	Ya - 3	Tidak - 4	<input type="checkbox"/>
	c. Penambahan jumlah anggota hansip/linmas:	Ya - 5	Tidak - 6	<input type="checkbox"/>
	d. Pelaporan tamu yang menginap lebih dari 24 jam ke aparat lingkungan:	Ya - 7	Tidak - 8	<input type="checkbox"/>
	e. Pengaktifan sistem keamanan lingkungan berasal dari inisiatif warga:	Ya - 1	Tidak - 2	<input type="checkbox"/>
1305	Jumlah anggota linmas/hansip di desa/kelurahan:			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> orang
1306	a. Keberadaan pos polisi (termasuk kantor polisi) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 → R1306c <input type="checkbox"/>			
	b. Jumlah pos polisi (termasuk kantor polisi):			
	1. Digunakan:			<input type="checkbox"/> unit
	2. Tidak digunakan:			<input type="checkbox"/> unit
c. Jika tidak ada pos polisi,				
1. Perkiraan jarak ke pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat (km):			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
2. Kemudahan untuk mencapai pos polisi (termasuk kantor polisi) terdekat:			<input type="checkbox"/>	
			<i>Sangat mudah - 1 Mudah - 2 Sulit - 3 Sangat sulit - 4</i>	
1307	Jumlah korban bunuh diri (termasuk percobaan bunuh diri) yang terjadi di desa/kelurahan selama setahun terakhir :			<input type="checkbox"/> orang
1308	a. Keberadaan lokasi berkumpul/mangkal anak jalanan (selain rumah singgah) di desa/kelurahan: Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>			
	b. Keberadaan tempat mangkal gelandangan/pengemis di desa/kelurahan: Ada - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>			
1309	Keberadaan lokalisasi/lokasi/tempat mangkal Pekerja Seks Komersial (PSK) di desa/kelurahan:			<input type="checkbox"/>
			Ada - 1 Tidak ada - 2	

XV. PENGGUNAAN DANA DESA

Blok ini akan terisi jika Blok III R 301, status pemerintahannya adalah Desa (Jika Blok III R301 berstatus UPT/SPT maka langsung ke R1601)

1501	Tuliskan program/kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan di desa yang menggunakan Dana Desa selama tahun 2015-2018			
	No	Uraian Kegiatan	Penyelenggaraan pemerintahan - 1 Pembinaan kemasyarakatan - 2	Tahun
	(1)	(2)	(3)	(4)
	1		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	5		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6		<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7		<input type="text"/>	<input type="text"/>
8		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

1502	Tuliskan program/kegiatan pembangunan di desa yang menggunakan Dana Desa selama tahun 2015-2018						
	No	Jenis pembangunan	Kode pembangunan [Diisi oleh PML]	Pembangunan baru - 1 Renovasi - 2	Tahun	Pelaksana [kode]	Penerima manfaat langsung [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	1	Jalan <input type="text"/> m	0 2 0 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	5		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	8		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kode kolom (6) dan kolom (7):

Penduduk miskin - 1 Petani/nelayan - 2 Kelompok usaha masyarakat - 3 Sebagian besar warga - 4 Swasta/pengusaha - 5 Lainnya - 6

1503	Tuliskan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa yang menggunakan Dana Desa selama tahun 2015-2018					
	No	Jenis Pemberdayaan	Kode pemberdayaan [Diisi oleh PML]	Tahun	Pelaksana [kode]	Penerima manfaat langsung [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	1		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	4		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	5		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	6		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	7		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	8		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Kode kolom (5) dan kolom (6):

Penduduk miskin - 1 Petani/nelayan - 2 Kelompok usaha masyarakat - 3 Sebagian besar warga - 4 Swasta/pengusaha - 5 Lainnya - 6

1504 a. Permasalahan yang dihadapi dalam penggunaan **Dana Desa** selama tahun **2017**:

1. Penyaluran tidak tepat waktu Ya - 1 Tidak - 2 4. Tidak memahami peraturan Ya - 7 Tidak - 8

2. Pendampingan tidak optimal Ya - 3 Tidak - 4 5. Kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai Ya - 1 Tidak - 2

3. Proses pencairan dana sulit Ya - 5 Tidak - 6 6. Lainnya (.....tuliskan)

b. Jika ada permasalahan, permasalahan utama yang dihadapi (Pilih salah satu kode pada **R1504a yang dijawab "Ya"**)

1505 a. Apakah **Dana Desa** tahun 2018 sudah cair? Ya - 1 Belum - 2 → **R1505c**

b. 1. Tahap I : Bulan, sebesar persen 2. Tahap II : Bulan, sebesar persen

c. Jika belum menerima **Dana Desa**, penyebabnya adalah:

1. Masih dalam proses Ya - 1 Tidak - 2

2. Belum menyerahkan laporan penggunaan dana desa sebelumnya Ya - 3 Tidak - 4

3. Aparat desa terbatas Ya - 5 Tidak - 6

4. Pembuatan APBDes atau RKPDesa terlambat Ya - 7 Tidak - 8

5. Kendala teknis di kabupaten/kota (seperti: peraturan pencairan) Ya - 1 Tidak - 2

6. Lainnya (.....tuliskan)

XVI. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

1601 Program/kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan (**selain yang bersumber dari Dana Desa**) selama **2015-2017**:

Jenis program/kegiatan pembangunan/pemberdayaan masyarakat	Kegiatan: Ada - 1 Tidak ada - 2	Jika ada program/kegiatan (kolom (2) berkode 1)		
		Sumber dana [kode]	Pelaksana [kode]	Penerima manfaat langsung [kode]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Pembangunan				
1. Sarana prasarana transportasi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
2. Sarana prasarana energi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
3. Sarana prasarana informasi dan komunikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
4. Sarana prasarana sanitasi dan air bersih	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
5. Sarana prasarana pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
6. Sarana prasarana perdagangan dan jasa	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
7. Sarana prasarana produksi pertanian dan industri kecil desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
8. Sarana prasarana rekreasi dan wisata	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
9. Sarana prasarana penanggulangan bencana dan pelestarian alam	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
10. Sarana prasarana penunjang pemerintahan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
b. Pemberdayaan				
1. Pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan masyarakat	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
2. Pengelolaan lingkungan perumahan desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
3. Pengelolaan transportasi desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
4. Pengembangan energi terbarukan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
5. Pengelolaan informasi dan komunikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
6. Pengelolaan usaha produktif berbasis pertanian dan industri kecil desa non pertanian	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
7. Peningkatan kesadaran dalam pelestarian alam dan penanggulangan bencana	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
8. Peningkatan peran masyarakat untuk meningkatkan tata kelola desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
9. Peningkatan kualitas dan kapasitas masyarakat desa/kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
10. (Khusus untuk Desa) Pendirian dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa Bersama	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>
Kode untuk Kolom (3): isian boleh lebih dari satu kode		Kode kolom (4) dan kolom (5): isian boleh lebih dari satu kode		
APBD Prov/Kab/Kota - 1	Swadaya - 4	Penduduk miskin - 1	Sebagian besar warga - 8	
Pendapatan Asli Desa - 2	Lainnya - 8	Petani/nelayan - 2	Swasta/pengusaha - 16	
		Kelompok usaha masyarakat - 4	Lainnya - 32	

XVII. KETERANGAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

1701	Keberadaan Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan				
	Pemerintah desa/kelurahan	Keberadaan <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Jika ada pemerintah desa/kelurahan (kolom (2) berkode 1)		
			Umur	Jenis kelamin <i>Laki-laki - 1</i> <i>Perempuan - 2</i>	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan [kode]
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Kepala Desa/Lurah	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>*) Kode kolom (5): <i>Tidak pernah sekolah - 1</i> <i>SMP/Sederajat - 4</i> <i>Diploma IV/S1 - 7</i> <i>Tidak tamat SD/Sederajat - 2</i> <i>SMU/Sederajat - 5</i> <i>S2 - 8</i> <i>Tamat SD/Sederajat - 3</i> <i>Akademi/DIII - 6</i> <i>S3 - 9</i></p>					

1702	Jumlah aparatur pemerintahan:			
a. Sekretariat Desa/Kelurahan (bendahara, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/>	c. Pelaksana Kewilayahan (kadus, ketua RT, ketua RW, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/>	
b. Pelaksana Teknis (kaur, kasi, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/>	d. Pegawai Desa/Kelurahan lainnya (hansip, dll.)	<input type="text"/> <input type="text"/>	

XVIII. MODUL

1801	Penduduk pada 1 Januari 2018:			
a. Penduduk yang belum merekam e-KTP:	<i>Ada, sebagian besar - 1</i>	<i>Ada, sebagian kecil - 2</i>	<i>Tidak ada - 3</i>	<input type="checkbox"/>
b. Penduduk yang tidak tercatat di KK:	<i>Ada, sebagian besar - 1</i>	<i>Ada, sebagian kecil - 2</i>	<i>Tidak ada - 3</i>	<input type="checkbox"/>

1802	a. Keberadaan permukiman liar di desa/kelurahan: <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2 → R1802c</i> <input type="checkbox"/>			
b. Jika ada permukiman liar, jumlah lokasi:		<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi	
c. Jumlah fasilitas umum/fasilitas sosial yang ditinggali penduduk:				
1. Pasar	<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi	4. Kolong Jembatan	<input type="text"/> <input type="text"/>
2. Stasiun	<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi	5. Pelabuhan	<input type="text"/> <input type="text"/>
3. Terminal	<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi		

1803	a. Keberadaan suku terasing/masyarakat hukum adat di desa/kelurahan: <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2 → R1804</i> <input type="checkbox"/>			
b. Jika ada suku terasing/masyarakat hukum adat :				
1. Perkiraan jumlah keluarga	<input type="text"/> <input type="text"/>			keluarga
2. Perkiraan jumlah orang	<input type="text"/> <input type="text"/>			orang

1804	Keberadaan permukiman khusus:			
a. Permukiman/perumahan mewah	<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi	f. Permukiman di pantai/laut/danau	<input type="text"/> <input type="text"/>
b. Apartemen	<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi	g. Asrama/barak militer	<input type="text"/> <input type="text"/>
c. Rumah susun	<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi	h. Penduduk yang tinggal di daerah perbatasan,	
d. Sekolah berasrama (<i>boarding school</i>)	<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi	terpencil, atau <i>remote area</i>	<input type="text"/> <input type="text"/>
e. Kos-kosan	<input type="text"/> <input type="text"/>	lokasi	i. LP/Rutan	<input type="text"/> <input type="text"/>

XIX. CATATAN



Sensus
Penduduk
2020

<http://pinrangkab.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Isa No.18 Pinrang 91211

Telp. (0421) 921021, Fax (0421)921021

Homepage: <http://pinrangkab.bps.go.id> E-mail: bps7315@bps.go.id